

1

PENELITIAN KINERJA PUSKESMAS DALAM IMPLEMENTASI BPJS DI PROVINSI JAMBI

Tim Peneliti :

Novia Susianti, SKM, M.Biomed

Dr. Guspianto, M.Kes

Dr.dr. Sotianingsih, SPPK

Joni Martin,SH

1. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar dan menjadi hak setiap warga negara untuk dapat memperolehnya dan merupakan bagian dari sistem kesehatan yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena bertujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat diwujudkan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Manfaat dari jaminan kesehatan dalam JKN bersifat pelayanan kesehatan perorangan secara

komprehensif yang dilakukan secara berjenjang mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL), dan melalui program JKN diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat karena selain tidak hanya dapat mengurangi beban finansial hingga “pemiskinan” akibat sakit terutama ketika menderita penyakit kronis atau penyakit yang berbiaya mahal (katastropis), program JKN juga mendorong adanya fasilitas dan layanan kesehatan terstandar, dan dengan rancangan pembayar tunggal (*single payer*), memungkinkan Pemerintah memiliki kendali kuat untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan tersebut (Thabrany, 2015).

Sebagai badan penyelenggara JKN, BPJS menerapkan model sistem pelayanan kesehatan yaitu meningkatkan basis mutu di pelayanan primer yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama dimana semua keluhan kesehatan, promotif, preventif dan surveilans dilakukan, dengan dasar pelayanan primer. Pelayanan primer merupakan pelayanan kesehatan dengan equity besar (aksesibel bagi semua golongan) dan biaya terjangkau.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPJS tahun 2014 dengan daerah uji coba meliputi seluruh Puskesmas di 3 (tiga) wilayah yaitu Kota Padang, Kota Pekanbaru dan Kota Jambi (sebagai kontrol) pada bulan Desember 2014 s.d Mei 2015, menemukan konsekuensi perubahan kapitasi berdampak pada peningkatan kinerja Puskesmas dengan indikator peningkatan tertib administrasi dengan melakukan pencatatan terhadap semua kegiatan Puskesmas secara komprehensif, adanya upaya mengendalikan rujukan non

spesialistik, peningkatan motivasi, terjadi persaingan sehat antara dua kota uji untuk memberikan hasil terbaik.

Kesiapan masing-masing Puskesmas dalam rangka penanganan penyakit yang telah ditentukan harus tuntas dilakukan di Puskesmas, tentunya akan bervariasi dan belum terdapat data yang dapat menggambarkan kondisi nyata kesiapan Puskesmas di Provinsi Jambi dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, terdapat keluhan masyarakat dimana masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit, serta adanya anggapan bahwa pelayanan dan mutu Puskesmas jauh lebih rendah dibandingkan rumah sakit ataupun praktek dokter. Anggapan tersebut hendaknya sedikit demi sedikit dihilangkan dari benak masyarakat, untuk itu perlu ditemukan langkah strategi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagai implementasi program JKN_BPJS Kesehatan dengan tentunya melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kinerja yang telah dicapai selama ini.

2. Tujuan

1. Mengetahui pemenuhan standar mutu Puskesmas dengan indikator pemenuhan standar terhadap tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, metode pelayanan berdasarkan PPK, SOP dan alur kerja, pembiayaan serta sistem informasi dan pelaporan.
2. Mengetahui pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan dengan indikator tatalaksana kepesertaan, tatalaksana pelayanan kesehatan meliputi benefit, prosedur pelayanan, tatalaksana pembayaran meliputi besaran kapitasi/klaim, waktu pembayaran, cara

pembayaran dan pemanfaatan dana, serta penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa.

3. Mengetahui kinerja Puskesmas berdasarkan utilisasi atau cakupan pelayanan Puskesmas dengan indikator SPM Puskesmas.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth Interview*) menggunakan kuesioner terstruktur, penyebaran angket pengukuran kepuasan pasien, telaah dokumen, dan observasi untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang kinerja pelayanan Puskesmas dalam implementasi program JKN_BPJS Kesehatan di Provinsi Jambi.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jambi dengan objek penelitian berada di fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah dalam hal ini Puskesmas. Penentuan lokasi penelitian akan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan lokasi dilakukan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Pembagian wilayah kabupaten didasarkan pada Kantor Cabang BPJS di Provinsi Jambi yang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Cabang Jambi dan Cabang Bungo, masing-masing cabang akan dipilih 3 (tiga) kabupaten.
2. Pemilihan kabupaten yang akan mewakili berdasarkan pada letak geografis kabupaten tersebut. Wilayah barat (termasuk wilayah BPJS cabang Bungo) diwakili Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. Sedangkan untuk wilayah timur

(termasuk wilayah BPJS cabang Jambi) diwakili Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi.

3. Pemilihan Puskesmas dilakukan menurut jenis pelayanan, yaitu rawat inap dan non rawat inap. Puskesmas rawat inap diwakili oleh 1 Puskesmas/kabupaten. Puskesmas non rawat inap akan diwakili 2 (dua) buah Puskesmas dengan kriteria yaitu; (1) Puskesmas di wilayah kota dan termasuk Puskesmas binaan persiapan akreditasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan (2) Puskesmas yang mewakili daerah pedesaan dipilih dengan kriteria lokasi Puskesmas berbatasan dengan kabupaten/Provinsi lain, sehingga diharapkan dapat diketahui proses rujukan yang dilakukan oleh Puskesmas tersebut.

4. Hasil Penelitian

Struktur Organisasi Dan Kerjasama Program JKN

Pada umumnya Puskesmas belum membuat dan menetapkan struktur organisasi program pelayanan JKN, dan tidak melakukan kerjasama secara langsung dalam pengelola program pelayanan JKN dengan pihak BPJS.

Standar Fasilitas Pelayanan

1. SDM Kesehatan

Kondisi tenaga kesehatan di Puskesmas secara kuantitas masih kurang dan belum merata terutama di daerah pedesaan dan terpencil, khususnya tenaga dokter, perawat, gizi, analis laboratorium, dan farmasi,

serta non kesehatan seperti sarjana komputer. Sementara itu, upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Puskesmas juga masih belum memadai dikarenakan keterbatasan anggaran.

2. Fasilitas Kesehatan (Peralatan Kesehatan, Obat-obatan, dan BMHP)

Ketersediaan fasilitas kesehatan masih belum memadai dalam menunjang pelayanan di Puskesmas, antara lain: peralatan kesehatan poliklinik umum (tensimeter, timbangan, THT set dan diagnostic set); obat-obatan (ciprofloxacin, asam mefenamat, lidocain injeksi, obat penyakit jiwa dan jantung, dan lain-lain); dan Bahan Medis Habis Pakai (reagen pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, kimia darah, widal, malaria, dan TBC).

3. Metode Pelayanan (Alur Pelayanan, SPO, dan PPK)

Puskesmas umumnya belum menerapkan metode pelayanan JKN/BPJS dengan optimal, antara lain belum menetapkan dan mem-visualisasikan alur pelayanan JKN-BPJS termasuk pelayanan rujukan, sebagian Puskesmas belum menetapkan SPO pelayanan, dan tidak semua petugas Puskesmas mematuhi SPO yang telah ditetapkan dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mutu. Dalam hal pelayanan medis, umumnya dokter Puskesmas telah memiliki dan mematuhi panduan praktik klinis (PPK).

4. Pembiayaan

Pembiayaan di Puskesmas sebagian besar bersumber dari BPJS Kesehatan melalui dana kapitasi dan non kapitasi yang dimasukkan ke dalam struktur APBD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Jumlah besaran kapitasi dan non kapitasi di Puskesmas secara umum terus mengalami peningkatan. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait pembiayaan di Puskesmas, antara lain:

- a. Di beberapa kabupaten/kota, masuknya dana BPJS Kesehatan ke dalam struktur APBD Dinas Kesehatan cenderung menghambat peningkatan alokasi anggaran untuk program kesehatan lainnya seperti upaya promotif dan preventif.
- b. Puskesmas tidak dapat memprediksi besaran dana kapitasi yang menjadi penerimaan untuk membuat rencana kerja dan anggaran Puskesmas, karena tidak memiliki *up date* data peserta BPJS Kesehatan per bulan.
- c. Definisi kriteria *contact rate* dalam perhitungan besaran kapitasi oleh BPJS Kesehatan dinilai memberatkan Puskesmas karena tidak sesuai beban nyata sumber daya yang telah dikeluarkan dan dapat berdampak pada sistem pelayanan, menurunkan motivasi dan kinerja petugas, dan berpotensi menimbulkan fraud (kecurangan).

5. Sistem informasi dan Pelaporan

Sistem informasi data base kepesertaan BPJS Kesehatan di Puskesmas menggunakan aplikasi komputer berbasis on line (*p-care*) untuk verifikasi peserta, namun Puskesmas umumnya sulit mengakses

jaringan internet sehingga mengganggu proses pelayanan dan pengajuan klaim. Selain itu, sebagian besar Puskesmas tidak melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan JKN/BPJS dengan alasan sudah diinput ke dalam sistem aplikasi *p-care* BPJS.

Standar Proses Pelayanan

1. Tatalaksana Kepesertaan

Secara umum, peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas didominasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendapat subsidi dari Pemerintah Pusat dan sebagian besar Puskesmas tidak memiliki data peserta BPJS Kesehatan secara lengkap dan akurat. Tatalaksana kepesertaan di Puskesmas dilakukan melalui verifikasi kartu BPJS Kesehatan pada aplikasi *p-care* secara *on-line*. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait tatalaksana kepesertaan di Puskesmas:

- a. Verifikasi peserta sulit dilakukan karena tidak tersedianya jaringan internet
- b. Masih banyak peserta menggunakan kartu BPJS Kesehatan sementara.
- c. Masih ditemukannya pengunjung yang lupa/tidak membawa kartu BPJS dan merupakan peserta FKTP lain.
- d. Ditemukannya kasus pindah status kepesertaan BPJS Kesehatan tanpa sepengetahuan peserta yang bersangkutan.

2. Tatalaksana Pelayanan

- a. Sebagian besar jenis pelayanan JKN untuk FKTP telah dilaksanakan di Puskesmas, kecuali tindakan KB operatif, transfusi darah, pemeriksaan kanker payudara, dan pelayanan rujuk balik yang umumnya belum diberikan.
 - b. Tidak semua kasus medis dapat terlayani atau diselesaikan secara tuntas di Puskesmas, disebabkan faktor-faktor: 1) Peralatan kesehatan yang kurang, tidak memadai, dan tidak layak; 2) Obat-obatan yang kurang dan tidak memadai, dan; 3) Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM di Puskesmas.
 - c. Tidak ada batasan pemberian pelayanan JKN di Puskesmas baik rawat jalan ataupun rawat inap.
 - d. Terdapat 5 (lima) alasan pasien dirujuk, yaitu: 1) sesuai indikasi medis; 2) tidak memiliki sarana pemeriksaan; 3) tidak memiliki obat; 4) permintaan pasien, dan; 5) tenaga medis tidak berada di tempat.
3. Tatalaksana Pembayaran dan Pemanfaatan Dana
- a. Pembayaran dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan ke Puskesmas melalui transfer ke rekening bendahara JKN Puskesmas, sedangkan dana non kapitasi ditransfer ke rekening Kas Daerah.
 - b. Pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi oleh BPJS Kesehatan tepat waktu setiap bulannya, namun Puskesmas tidak dapat memanfaatkan secara langsung karena harus mengikuti mekanisme APBD yang cenderung terlambat.

- c. Sebagian Puskesmas tidak bisa memanfaatkan biaya operasional dari kapitasi JKN karena tidak memiliki kewenangan.
 - d. Umumnya Puskesmas mengeluh kesulitan dalam pengajuan klaim dana non kapitasi karena terlalu banyak berkas yang harus disiapkan.
4. Penanganan Keluhan dan Penyelesaian Sengketa
- Keluhan peserta BPJS Kesehatan terhadap pelayanan di Puskesmas umumnya adalah: 1) pelayanan laboratorium; 2) pelayanan obat; 3) proses pendaftaran (*admission*); dan 4) masalah rujukan pasien.

Kinerja Puskesmas

Secara umum cakupan (utilisasi) pelayanan di Puskesmas khususnya kunjungan rawat inap, kunjungan rawat jalan, K1 ibu hamil, K4 ibu hamil, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan KB, imunisasi BCG/DPT, dan imunisasi Campak mengalami peningkatan selama mulai diberlakukannya program JKN tahun 2014.

5. Rekomendasi

1. Perlu dibuat regulasi berupa Peraturan (Gubernur/Bupati/Walikota) mengenai konsep pelayanan kesehatan tingkat pertama khususnya Puskesmas, untuk penetapan kerjasama pelayanan JKN di Provinsi Jambi berdasarkan hasil pemetaan terkait: kawasan (perkotaan, pedesaan, terpencil, dan sangat terpencil); kondisi SDM; ketersediaan sarana prasarana; kapasitas dan jenis pelayanan; rasio penduduk, dan lain sebagainya.

2. Perlu dibuat kebijakan bersama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan terkait pedoman pelaksanaan pelayanan JKN di Puskesmas yang ditindaklanjuti Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan membuat petunjuk teknis pelayanan JKN di Puskesmas dalam percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi.
3. Perlu disusun kajian, kebijakan dan komitmen bersama antara pihak Dinas Kesehatan dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam pengadaan dan pendistribusian tenaga Puskesmas untuk mendukung program dan pelayanan JKN di Puskesmas khususnya tenaga dengan kompetensi tertentu seperti tenaga dokter, perawat, gizi, analis laboratorium, farmasi, dan tenaga ahli komputer.
4. Perlunya dibentuk regulasi berupa Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana kapitasi/non kapitasi JKN di Puskesmas khususnya pada penggunaan biaya operasional untuk menunjang pelayanan seperti pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, dan BMHP.
5. Diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dapat memberikan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Jambi untuk diteruskan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait insentif biaya pembinaan pelayanan JKN di faskes primer.

2

PENELITIAN POLA HUBUNGAN LINTAS BIDANG DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN DI PROVINSI JAMBI

Tim Peneliti :

Dr. Zarmaili, MM
Septu Haswindy, SS, M.Si
Nurbaiti, S.Sos. M.Si

1. Latar Belakang

Secara kronologis, semenjak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang terdapat beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Selain UU Desa, komitmen pemerintah untuk memajukan desa tertuang dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019. Hal ini dapat dilihat dari poin ke 3 dari Nawacita

yaitu; “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Selain itu, dalam RPJMN 2015-2019, terdapat 3 dimensi pembangunan yang diantaranya adalah dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pada dimensi kewilayahan ini tertuang komitmen Pemerintah dalam pembangunan desa.

Berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan desa menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan Dokumen RPJM Desa dan menyelaraskan dengan rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi.

Oleh karena itu, dalam merumuskan RPJMDes dan RKPDes, diperlukan sinergi dan sinkronisasi antar stakeholders terkait, baik di tingkat pusat, Provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Karena rencana pembangunan yang akan dirumuskan haruslah berdasarkan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pihak hirarki pemerintahan di tingkat atas. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat tercapai secara nasional, tujuan pembangunan nasional adalah kesejahteraan masyarakat.

Misalnya dalam program penanggulangan kemiskinan, diperlukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan dari tingkat pusat, daerah, hingga tingkat desa. Caranya adalah dengan mengintegrasikan strategi program penanggulangan kemiskinan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara itu, di level desa, program-program

penanggulangan kemiskinan di tingkat desa harus diintegrasikan ke dalam RPJM Desa. Sehingga, RPJM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, selanjutnya bisa dijadikan acuan dalam penyusunan RKP Desa setiap tahunnya. Proses pengintegrasian ini tentu saja harus dilakukan melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbang kabupaten/kota, dengan melaksanakan prinsip partisipasi dan pemetaan yang tepat serta komprehensif. Dengan demikian, akan dihasilkan sinergi dalam perencanaan daerah, antara strategi pembangunan yang dari atas (*top down*) dengan partisipasi masyarakat dari bawah (*bottom up*).

Dengan diterapkannya UU Desa, maka otoritas dan peran desa menjadi jelas, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desanya sendiri. Dalam UU Desa, upaya pembangunan kawasan perdesaan, menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Besarnya tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah desa tidaklah sesuai dengan kesiapan dari desa itu sendiri. Masih kurangnya pengetahuan SDM tentang pemerintahan, penganggaran, perencanaan pembangunan serta pertanggung jawaban keuangan merupakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah desa saat ini.

Di Provinsi Jambi tahun 2016 terdapat 1558 Desa/Kelurahan (Provinsi Jambi Dalam Angka, 2016), diantara desa-desa tersebut 1386 desa hanya bergantung pada dana Alokasi Dana Desa dan hanya 547 desa yang mempunyai PAD. Hal ini berarti terdapat sekitar 39,46 % desa yang masih bergantung pada ADD dan belum siap

untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, dituntut unsur-unsur pemerintahan desa harus sinergi dalam melaksanakan proses pemerintahan desa.

Sesuai dengan amanat UU Desa, desa mendapatkan kewenangan penuh dalam menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan dan pembangunan sendiri. Hal ini berarti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Elemen masyarakat lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 1). memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan perdesaan pasca diterapkannya UU Desa, 2). mendeskripsikan hubungan antar aktor yang terlibat dalam pembangunan perdesaan, 3). mendeskripsikan faktor-faktor penghambat pembangunan perdesaan.

2. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan berbagai permasalahan serta persoalan tentang pembangunan di perdesaan yang berkenaan dengan hubungan lintas bidang, maka tujuan penelitian adalah: 1). Untuk memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan perdesaan pasca diterapkannya UU Desa, 2). Untuk mendeskripsikan hubungan antar aktor yang terlibat dalam pembangunan perdesaan, dan 3). Untuk mendeskripsikan faktor - faktor penghambat pembangunan perdesaan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis rancangan penelitian Deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Jambi dengan sampel

penelitian di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Tebo dan Merangin. Pelaksanaan penelitian selama 2 bulan yang dimulai pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2016, Metode pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive sampling*, selain itu dilakukan wawancara mendalam terhadap Aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pembangunan perdesaan seperti Kepala desa, Sekretaris Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat Desa serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten.

4. Hasil Penelitian

Secara umum hasil penelitian pola hubungan lintas bidang pembangunan perdesaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari tiga tahapan dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan di Provinsi Jambi, tahapan perencanaan masih memerlukan perbaikan dan pendampingan dalam pelaksanaannya. Tahapan perencanaan masih belum mencerminkan perencanaan partisipatif selain itu perencanaan belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
2. Hubungan antar aktor (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Pendamping Desa dalam pembangunan desa;
 - a. Pemerintah Pusat (Kemendes) membatasi penggunaan dana desa sehingga kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,

- b. Pemerintah Provinsi sebatas monitoring, pembinaan dan pengawasan sedangkan tingkat wewenangnya masih lemah.
 - c. Pemerintah Kabupaten sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam Permendes.
 - d. Kerjasama antar bidang pada pemerintahan desa masih lemah, karena masih adanya pengkotakan berdasarkan politik dan kekeluargaan.
3. Sistem Informasi dan Data Desa merupakan salah satu elemen penunjang kemajuan dalam pembangunan perdesaan, akses internet dan keberadaan operator di desa.

4. Rekomendasi

Dari hasil penelitian adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebagai pedoman bagi Pendamping desa agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mendampingi Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan perdesaan.
2. Perlu dibentuknya tim koordinasi penguatan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan kawasan perdesaan guna memantau pelaksanaan dan kemajuan pembangunan desa.

3. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten perlu membantu pemerintah desa dalam pembuatan peta desa melalui kerjasama dengan BPN setempat.
4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terus menerus melakukan pembinaan pada Pemerintah Desa
5. Pemerintah Kabupaten harus memfasilitasi input data bagi sistem informasi dan data desa serta profil desa bagi desa-desa yang tidak terjangkau jaringan internet.
6. Bappeda diharapkan dapat menyelaraskan program-program di SKPD baik di Lingkup Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten terutama yang berkaitan dengan Pembangunan Perdesaan.

3

PENELITIAN POTENSI ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI PROVINSI JAMBI

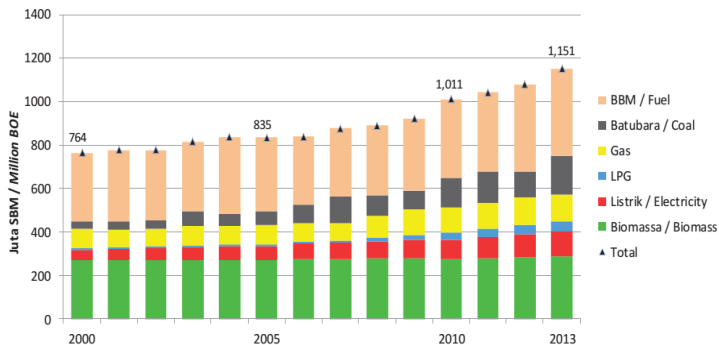
Tim Peneliti :

Joni Martin, SH
Yonggi Puriza, ST, MT
Rahmad Supriadi, ST
Masril, ST

1. Latar Belakang

Salah satu arah agenda riset prioritas nasional 2015-2019 adalah bidang energi nusantara, yang meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemanfaatan air dan kemaritiman. Pentingnya kedaulatan energi dikarenakan Energi adalah pondasi dari kehidupan. Energi mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggerakkan roda kehidupan dan perekonomian. Pengaruh ini tidaklah datang dengan tanpa sebab, awalnya sejak terjadi krisis energi tahun 1970 dalam skala besar, kondisi ini menyebabkan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Swiss, Norwegia dan Denmark mulai sadar bahwa energi sangat berperan penting dalam kehidupan. Pengaruh ini juga kemudian menyebabkan seluruh negara-negara di dunia sadar atas posisi strategis energi sebagai sesuatu yang perlu dijaga dan di lestarikan.

BPPT di dalam buku Outlook Energi Indonesia 2016 menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap energi fosil terutama minyak bumi dalam pemenuhan konsumsi di dalam negeri masih tinggi, walaupun upaya pengembangan energi baru dan terbarukan terus digiatkan, namun upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan tersebut belum dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.

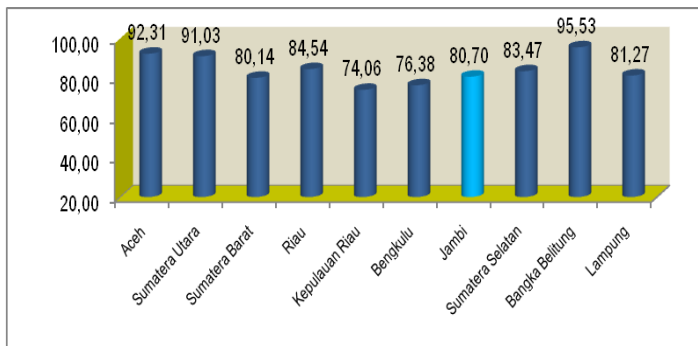


Dilihat dari konsumsi energi final berdasarkan jenisnya masih didominasi untuk kebutuhan BBM, kemudian Biomassa, Gas, Batubara dan Listrik. Beberapa konsumsi energi final merupakan kebutuhan dasar yang harus terus dikembangkan dan dicari solusi pemecahan masalah ketika sumbernya mengalami penurunan dan hinggaterjadinya krisis energi bisa dihindari.

Tidak berbeda dengan Listrik sebagai salah satu energi yang sangat dekat dengan masyarakat. Kebutuhan listrik global akan meningkat 67% selama periode 2011-2035 atau naik menjadi 32.150 Twh pada tahun 2035

dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,2% per tahun. Berdasarkan statistik penentu garis kemiskinan, listrik menempati posisi kedua setelah perumahan pada indikator penentu non makanan oleh masyarakat. Di beberapa Negara maju, listrik diperlakukan sebagai infrastruktur dasar dan komoditas penentu perekonomian.

Tingkat elektrifikasi Beberapa wilayah di Sumatera

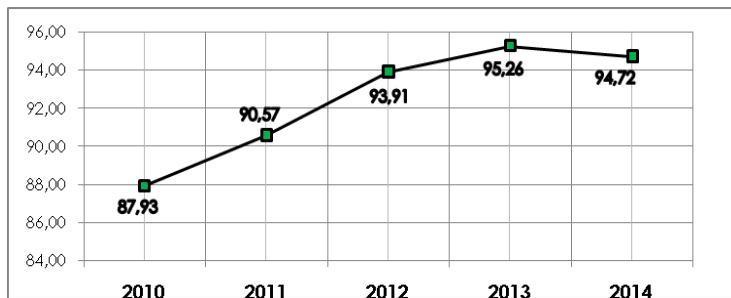


Sumber: Statistik Kelistrikan, 2015.

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa tingkat elektrifikasi rata-rata pada tahun 2004 di wilayah Sumatera belum ada yang terpenuhi secara utuh, artinya tiap daerah masih ada wilayah yang berkontribusi pada daerah tidak teraliri listrik. Provinsi Jambi salah satunya, pada tahun 2014 tingkat elektrifikasi baru sebesar 80.70%, masih berada di bawah nasional rata-rata yakni 84.35. secara nasional Provinsi Jambi berada pada urutan ke 18, sementara untuk wilayah Sumatera, tingkat elektrifikasi Provinsi Jambi berada pada urutan ke 6, artinya masih banyak keluarga (54.828 Keluarga) yang belum tersentuh aliran listrik.

Provinsi Jambi yang membutuhkan pasokan energi besar terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan kebutuhan sumber energi untuk penerangan listrik rumah tangga perhatikan grafik berikut:

Persentase Sumber Penerangan Listrik Rumah Tangga 2010-2014 di Provinsi Jambi



Sumber: BPS, 2014

Dari gambar di atas, peningkatan terjadi sangat besar mencapai $\pm 2\%$ pertahun, artinya pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan sumber energi tersebut. Akan tetapi keterbatasan sumber daya yang ada menyebabkan di sebagian daerah masih terkendala dalam pemenuhannya. Banyaknya keluarga yang belum tersentuh aliran listrik, rata-rata berada di wilayah pedesaan yang terpencil. Beberapa usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa terpencil sebenarnya sudah banyak, seperti memanfaatkan sumber Energi baru dan terbarukan yang ada di daerah melalui pemanfaatan tenaga surya, dan tenaga air. Namun usaha tersebut masih belum optimal, beberapa daerah di Provinsi Jambi masih belum tersentuh oleh usaha

pemerintah akibat ketersediaan anggaran yang minim, sehingga pemerintah diharapkan mencari solusi lain berupa potensi Energi baru dan terbarukan yang tidak membutuhkan biaya besar namun berada langsung di tengah-tengah masyarakat.

2. Identifikasi Masalah

1. Kebutuhan Energi terus meningkat (ekonomi meningkat, penduduk bertambah, kebutuhan bertambah).
2. Cadangan Energi fosil (BBM, Gas, BatuBara) terus berkurang.
3. Energi Fosil tidak lagi diandalkan sebagai sumber energi dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi dimasa depan.
4. Masih banyak masyarakat yang belum menikmati aliran energi listrik.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi eksisting kebutuhan energi di Provinsi Jambi?
2. Berapa Jumlah Penduduk dan wilayah yang belum teraliri Listrik di Provinsi Jambi?
3. Potensi apa saja yang bisa di dimanfaatkan sebagai sumber Energi baru dan terbarukan guna memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat di Provinsi Jambi ditinjau dari prospek jangka pendek, menengah dan jangka Panjang?
4. Solusi serta strategi apa saja yang dapat diambil pemerintah guna memanfaatkan potensi sumber

energi yang ada dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat di Provinsi Jambi?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi eksisting kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
- 2) Memetakan Jumlah wilayah dan penduduk yang belum teraliri listrik di Provinsi Jambi.
- 3) Mengidentifikasi potensi yang di manfaatkan sebagai sumber Energi baru dan terbarukan guna memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat belum teraliri listrik di Provinsi Jambi.
- 4) Menemukan solusi serta strategi yang dapat diambil oleh pemerintah guna memanfaatkan potensi sumber energi yang ada untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat di Provinsi Jambi.

5. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah, memberikan gambaran kepada pengambil kebijakan bagaimana potensi Energi baru dan terbarukan di Provinsi Jambi sehingga dapat dikeluarkan satu kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat di Provinsi Jambi melalui pemanfaatan sumber Energi baru dan terbarukan.

6. Kesimpulan

1. Kondisi eksisting kebutuhan energi di Provinsi Jambi saat ini baru 83.50%, masih ada sekitar 16, 50 % masyarakat yang belum menikmati listrik dengan tingkat kebutuhan energi. Dengan Tingkat elektrifikasi terendah berdasarkan data tahun 2015 berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni 51,37% atau 38.993 keluarga dari 75.906 keluarga yang ada.
2. Potensi yang bisa di manfaatkan sebagai sumber energi baru dan terbarukan di Provinsi Jambi di tinjau dari prospek jangka pendek adalah Air dan matahari, untuk jangka menengah adalah biogas dan jangka panjang adalah panas bumi. Angin bukan merupakan potensi energi yang bisa dimanfaatkan di Provinsi Jambi secara optimal.
3. Strategi yang bisa di manfaatkan :
 - a. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Disekitar Masyarakat Dalam Mendukung Kebutuhan Energi.
 - b. Memanfaatkan Tenaga Masyarakat Lokal Untuk Mengelola Dan Merawat Alat Teknologi.
 - c. Memanfaatkan Dukungan Pendanaan Untuk Perbaikan Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah Menuju Lokasi Sumber Energi
 - d. Memanfaatkan Kerjasama Antar Lintas Sektoral Dalam Pendataan Sumber Energi Alternatif.

7. Rekomendasi Kebijakan

1. Mempertimbangkan untuk membentuk unit pengembangan pengelolaan Sumber Energi baru dan terbarukan khusus untuk wilayah terpencil dan tertinggal yang berupa UPTD atau setingkat.
2. Mendorong percepatan program pengembangan Energi baru dan terbarukan yang mengacu pada *blueprint* pengelolaan energi nasional guna memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal sebagai solusi jangka pendek.
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar bisa berperan aktif dalam memanfaatkan dan menjaga infrastruktur dan potensi energi yang telah ada.
4. Memanfaatkan potensi air dan tenaga surya untuk mengatasi kebutuhan energi listrik di daerah – daerah terpencil sebagai solusi jangka pendek.
5. Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Desa menunjuk dan memberikan pelatihan teknis kepada operator pengelola infrastruktur energi di Desa.
6. Memberikan pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan terhadap operator pengelola sumber Energi baru dan terbarukan di masyarakat.
7. Memberikan insentif tambahan kepada operator pengelola infrastruktur energi terutama pada daerah–daerah tertinggal dan terpencil.

4

PENELITIAN POTENSI PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI PROVINSI JAMBI

Tim Peneliti :

Dr. Ir. Hutwan Syarifuddin, MP

Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si

M. Rialdi Syaputra, SE

1. Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam bentuk ruang publik maupun privat memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia. RTH berperan penting dalam pembangunan kota berkelanjutan dan ekologi kota yang mampu memberi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Manfaat ekologis RTH antara lain karena vegetasi yang ada mampu berperan dalam membentuk iklim mikro bagi lingkungan sekitardan mampu mengurangi efek panas (Buyadi *et al.*, 2013). RTH mampu memberi ruang bagi manusia dalam mewadahi aktivitas/kebutuhan sosial, baik untuk olahraga, bersosialisasi dengan manusia lainnya maupun aktivitas sosial budaya lainnya. RTH juga berperan sebagai wadah bagi aktivitas ekonomi lokal/pasar.

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi,

industri dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis.

Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera dan tepat berhadapan langsung dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapura *Growth Triangle*). Secara administratif Provinsi Jambi terdiri dari sebelas kabupaten/kota yaitu sembilan kabupaten dan dua kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sudah ditetapkan dan terdiri atas Rencana Pola Pemanfaatan Ruang, Rencana Struktur Ruang dan Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jambi memiliki wilayah seluas 53.435,92 km² dengan dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan sebesar 3.274,95 km².

Penataan ruang wilayah Provinsi Jambi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. Provinsi Jambi juga memiliki Kawasan Strategis Nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan pada fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008, yakni: (1) Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga melibatkan sebagian wilayah Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. (2) Kawasan Taman Nasional Berbak. (3) Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan (4) Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Berdasarkan penunjukan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi 2.179.440 hektar atau 42,73 persen dari luas keseluruhan Provinsi Jambi. Luasan tersebut merupakan hasil dari pepaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi. Dimana komposisi penggunaan lahan di Provinsi Jambi tergambar pada tabel berikut ini :

**Penggunaan Lahan Eksisting
Provinsi Jambi**

No	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Presentase (%)
A	KAWASAN LINDUNG		
1	Hutan Lindung	191.130	3,56
2	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam		
	a. Cagar Alam	30.400	0,57
	b. Taman Nasional	608.630	11,35
	c. Taman Hutan Raya	36.660	0,68
	d. Taman Wisata Alam	430	0,01
B	KAWASAN BUDIDAYA		
1	Kawasan Pertanian		
	1. Pertanian Lahan Basah	684.060	12,76
	2. Pertanian Lahan Kering/Tegalan/Kebun Campur	3.767.801	70,26
2	Kawasan Permukiman	43.631	0,81
Total		5.362.742	100

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 Prov. Jambi

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lahan eksiting di Provinsi Jambi mayoritas pada kawasan pertanian yaitu sekitar 83,02 persen dan diikuti penggunaan terbesar lainnya pada kawasan lindung, kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebesar 15,48 persen dan hanya sedikit digunakan untuk ruang terbuka hijau berupa taman hutan raya dan taman wisata alam sebesar 0,69 persen dari keseluruhan total lahan di Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Selama periode 1990-2010, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi sebesar 1,77 persen pertahun (Jambi Dalam Angka 2015). Dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 66,67 jiwa/km². Dimana penyumbang terbesar tingkat kepadatan penduduk berada pada Kota Jambi sebesar 2765,23 jiwa/km².

Permasalahan utama dalam perkembangan suatu wilayah adalah semakin meningkatnya aktifitas dan akumulasi penduduk menuntut penyediaan ruang, sarana dan prasarana baru. Sebagai implikasinya adalah perubahan dan pertumbuhan bangunan serta sarana dan prasarananya yang ditandai dengan perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun.

Perlu diingat bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau ini tidak bisa ditunda lagi mengingat selain pesatnya pembangunan ditambah lagi desakan arus urbanisasi dan emisi karbon diperkotaan yang memicu perubahan iklim. Saat ini saja penduduk yang tinggal di perkotaan telah mencapai 54 persen. Jumlah itu diperkirakan terus meningkat hingga 68 persen pada tahun 2025. Karena itu

kebutuhan atas ruang terbuka hijau dalam porsi yang memadai di perkotaan sangat penting.

Mengingat proporsi pencapaian luas RTH di Provinsi Jambi merupakan amanah Undang-undang, oleh karena itu kajian terkait dengan potensi pengembangan ruang terbuka hijau di Provinsi Jambi penting untuk dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting sebaran ruang terbuka hijau di Provinsi Jambi dan potensi pengembangan untuk perluasan ruang terbuka hijau tersebut.

2. Perumusan Masalah

Provinsi Jambi saat ini belum memiliki informasi dan data RTH yang baik serta akurat, terutama data sebaran spasial RTH. Ketersediaan informasi dan data sangat penting dalam mendukung pengembangan RTH ke depan.

Permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi terkait penyediaan RTH dipengaruhi beberapa faktor diantaranya pertumbuhan aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk serta kebijakan pemerintah daerah. Pertumbuhan aktivitas ekonomi cenderung meningkatkan kebutuhan lahan. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak segera memenuhi kebutuhan lahan RTH akan berhadapan dengan permasalahan pengangguran seiring naiknya nilai lahan. Jumlah penduduk pada tahun 2004 sebesar 2.619.553 jiwa meningkat pada tahun 2014 menjadi 3.344.421 jiwa naik sebesar 28,9 persen selama sepuluh tahun dengan rata-rata per tahun naik 2,9 persen.

Peningkatan jumlah penduduk secara alami akan meningkatkan kebutuhan lahan pemukiman yang

cenderung memanfaatkan lahan RTH. Atas dasar perumusan masalah diatas disusun pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut : 1) Bagaimana kondisi eksisting penggunaan lahan di Provinsi Jambi?, 2) Berapa kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Jambi ?, 3) Areal apa yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai RTH di Provinsi Jambi ?

3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis luas dan distribusi kondisi eksisting penggunaan lahan di Provinsi Jambi.
2. Menganalisis kebutuhan RTH Provinsi Jambi guna memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang yang berlaku.
3. Menganalisis areal yang berpotensi untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Jambi.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan informasi kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau yang ada di Provinsi Jambi dan memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan perencanaan pembangunan Provinsi Jambi yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, budaya dengan lingkungan dalam hal ini dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

5. Kesimpulan

1. Penggunaan lahan di Provinsi Jambi dengan didominasi lahan non terbangun memiliki potensi

untuk pengembangan lahan dalam upaya pemenuhan luasan minimal ruang terbuka hijau (RTH).

2. Luas ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah menurut hasil perhitungan dimasing-masing kabupaten terdapat kekurangan antara kondisi RTH eksisting dengan kebutuhan ideal RTH secara proporsional belum mencukupi standar minimal kebutuhan ruang terbuka hijau.
3. Kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk dibandingkan dengan luasan RTH Eksisting Kabupaten/Kota didapatkan surplus RTH pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan persentase yang cukup besar karena jumlah penduduk yang masih sedikit pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
4. Ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten/Kota yang berpotensi untuk dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau dapat berupa sempadan sungai danau, jalur hijau jalan dan kawasan padang rumput.

6. Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah Kabupaten/Kota harus merumuskan peraturan daerah tentang RTH yang akan menjadi kerangka hukum utama untuk penyediaan RTH, penataan kelembagaan, mekanisme untuk partisipasi, mekanisme pengendalian dan mekanisme insentif-disinsentif.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengembangkan skema dalam mekanisme partisipasi yang dapat meningkatkan peran swasta dan masyarakat. Skema tersebut dapat dalam bentuk perjanjian perencanaan

dimana Pemerintah Kabupaten/Kota membuat perjanjian dengan pengembang untuk menyediakan lahan dan dana pembangunan RTH dengan insentif perizinan atau zonasi.

3. Perlu meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antar *stakeholder* di lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, SKPD, Kecamatan dan Kelurahan agar pengelolaan dan pengembangan RTH dapat terintegrasi dengan program-program pembangunan.
4. Mengidentifikasi asset-asset Pemda yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau.
5. Dalam perencanaan RTH perlu di pertimbangkan sisi nilai tambah ekonomisnya sehingga memberikan kontribusi bagi PAD.
6. Pengembangan Teknologi yang mendukung untuk pengaplikasian taman atap (*roof top garden*) dan *vertical garden* pada bangunan guna meningkatkan kualitas RTH.

5

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAYA SAING PRODUK LOKAL DI PROVINSI JAMBI

**(STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK
UNGGULAN KABUPATEN DI PROVINSI JAMBI DALAM
RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH)**

Tim Peneliti :

Ir. Mukhlis, M. Si

Dr. Darmawan, S.Sos. M.Si

1. Latar Belakang

Pembangunan secara garis besar adalah suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro, 2000). Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Rustiadi et al., 2006). Menurut Jamli (2003) terdapat tiga tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah; pertama, pembangunan

kesempatan kerja yang berkualitas bagi penduduk; kedua, mencapai perekonomian daerah yang stabil; dan ketiga membangun berbagai macam basis ekonomi dan kesempatan kerja.

Untuk mencapai tujuan di atas, daerah harus mengenal dengan baik potensi yang dimiliki serta memberdayakan berbagai sumber daya tersebut sebagai dasar dalam membangun daerah, khususnya perekonomian daerah dengan memperhatikan antara lain; kondisi ekonomi masyarakat, potensi sumber daya alam dan manusia, serta infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penekanannya adalah pembangunan yang berdasarkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang potensial untuk menciptakan peluang pekerjaan dan menstimulasi aktivitas ekonomi baru berbasis lokal (Blakely, 1994).

Jambi merupakan salah satu Provinsi yang berada di wilayah Pulau Sumatera bagian Selatan, tepatnya di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ibukotanya bernama sama dengan provinsinya. Provinsi Jambi terdiri dari sembilan kabupaten (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Bungo) dan dua kota (Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh) dengan luas keseluruhan 53.435 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2015 berjumlah 3.344.421 jiwa (Data BPS hasil sensus 2014). Dengan kepadatan penduduk 62,6/km², Provinsi Jambi memiliki

tingkat kesejahteraan penduduk yang cukup baik, tercermin dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercatat sebesar 68,24 (Data BPS tahun 2014).

Dalam perhitungan PDRB terdapat lima sektor yang paling berperan dimana sektor pertanian memiliki andil paling besar dalam pembentukan nilai pendapatan regional di Provinsi Jambi yaitu sebesar 27,81 %, sehingga perkembangan pertumbuhan lapangan usaha ini akan berdampak besar terhadap perekonomian Provinsi Jambi secara umum. Berdasarkan data yang ada dalam “Jambi dalam Angka tahun 2015”, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jambi tahun 2014 atas dasar harga konstan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 7,76 persen. Kenaikan ini merupakan pertumbuhan perekonomian secara riil dimana faktor inflasi/deflasi sudah dihilangkan. PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2012—2014 di Provinsi Jambi untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat dari 27,8 triliun di tahun 2012 meningkat menjadi 35,1 triliun di tahun 2013 dan meningkat menjadi 42,8 triliun di tahun 2014 (Tabel 1).

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa sektor pertanian masih merupakan sumber lapangan usaha andalan untuk Provinsi Jambi. Dengan demikian keberhasilan pembangunan di sektor pertanian akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PDRB Provinsi Jambi. Di sektor pertanian sendiri kegiatan budidaya dikelompokkan dalam beberapa bidang usaha, yaitu: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan kelautan dan perikanan. Pada kesempatan ini kelompok bidang usaha pertanian yang

akan dijadikan subjek dan objek kajian adalah tiga kelompok saja yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Provinsi Jambi, 2012—2014 (juta rupiah) untuk 5 lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar

Lapangan Usaha	Tahun		
	2012	2013	2014
A. Pertanian	27.833.052	35.058.392	42.791.716
B. Pertambangan dan penggalian	31.415.279	33.969.124	35.382.851
C. Industri Pengolahan	12.967.478	14.511.403	16.265.437
D. Perdagangan besar dan eceran	10.679.885	11.787.460	14.568.092
E. Konstruksi	7.333.576	8.929.902	10.260.688

Sumber: Jambi dalam Angka (2015)

Potensi wilayah kabupaten di Provinsi Jambi baik di wilayah pegunungan maupun wilayah pesisir menimbulkan wilayah-wilayah Kabupaten yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan produk unggulan. Pengembangan produk unggulan diharapkan tidak terlalu menekankan pada batas-batas administratif yang sering tidak dapat mengakomodasikan keberagaman potensi, permasalahan lokal, adanya saling keterkaitan antar daerah, serta bentuk dukungan lain yang dibutuhkan. Pembangunan harus

dilakukan secara sinergis antar Kabupaten agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di semua Kabupaten sebagai sebuah kesatuan pembangunan yang strategis bagi pembangunan daerah Provinsi Jambi. Daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan harus ditemukanali dan keterkaitan antar daerah harus diperkuat agar dapat mewujudkan mata rantai pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Tujuan

Kajian strategi pengembangan produk unggulan kabupaten di Provinsi Jambi ini adalah untuk merumuskan strategi dan program pengembangan produk unggulan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Sementara tujuan khusus kajian adalah:

1. Mengidentifikasi komoditas unggulan yang dimiliki Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jambi;
2. Mengumpulkan data atau informasi mengenai kebijakan lokal terkait strategi pengembangan produk unggulan kabupaten di Provinsi Jambi yang telah disusun selama ini, mereview data dan kebijakan tersebut untuk menentukan status implementasi dari masing-masing kebijakan tersebut khususnya yang berkaitan dengan keberhasilan, kegagalan dan kesenjangan yang ditemui selama proses implementasinya.
3. Memetakan seluruh *stakeholder* terkait strategi pengembangan produk unggulan kabupaten di Provinsi Jambi (*stakeholdersmapping*).
4. Menghimpun seluruh saran dan pendapat dari seluruh *stakeholder* dalam suatu forum pelaksanaan FGD.

5. Merumuskan draf info kebijakan (*policybrief*), strategi dan program pengembangan yang dirasakan paling tepat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan terkait pengembangan produk unggulan kabupaten di Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

3. Manfaat Kajian

Hasil kajian ini diharapkan akan menjadi sumbangan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan pembangunan kabupaten di Provinsi Jambi, khususnya pengembangan produk unggulan kabupaten di Provinsi Jambi.

5. Kesimpulan

Komoditas Kentang dan Wortel Sebagai Komoditas Unggulan Kab. Kerinci.

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dikumpulkan melalui hasil survey, FGD di Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci dan pembahasan pada waktu seminar, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketersediaan benih kentang berkualitas produksi balai benih induk sayuran dan penangkar benih kentang Kabupaten Kerinci belum dapat memenuhi permintaan benih untuk kebutuhan areal tanam kentangseluas ± 5.000 ha di Kabupaten Kerinci.
2. Motivasi penangkar benih kentang dan wortel masih rendah, harga benih tidak sesuai dengan harapan dan

ketika harga tinggi petani cenderung menjual dalam bentuk kentang konsumsi.

3. Petani kentang cenderung menggunakan pestisida kimia dalam pengendalian hama penyakit tanaman karena takut gagal..
4. Petani cenderung menanam kentang pada lahan miring dan perbukitan belum mengikuti kaedah konservasi tanah.

Langkah langkah yang ditempuh sebagai rekomendasi dalam rangka pengembangan kentang dan wortel sebagai komoditas unggulan berdaya saing Kabupaten Kerinci sebagai berikut.

1. Penyediaan benih bermutu .
 - a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya jumlah penangkar benih kentang agar mau memproduksi benih kentang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan benih di Kabupaten Kerinci. (Dinas Pertanian)
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawalan secara intensif pada setiap fase dalam penerapan teknologi tepat guna kepada penangkar benih (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta jajaran terkait).
 - c. Menetapkan harga standar benih bermutu dengan harga yang layak dan pantas serta memfasilitasi pemasaran benih. (Dinas Pertanian, Disperindag dan BUMN Sektor Pertanian).

2. Perbaikan budi daya kentang dan wortel.
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usahatani kentang dan wortel pada semua fase pertumbuhan tanaman sehingga menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi standar mutu kesehatan dan ekspor.
 - b. Pembinaan dan pengawasan sistem sistem pengendalian hama terpadu dengan menggunakan pestisida nabati dan meminimalisir penggunaan pestisida kimia, karena dianggap bahwa penggunaan pestisida kimia sudah berada diatas ambang kesehatan sehingga tersebut produk tersebut terkendala untuk diekspor.
 - c. Melakukan pergiliran tanaman secara mutlak dengan komoditas lain untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit.
 - d. Mengatur jadwal tanam antar gabungan kelompok tani sehingga kontinuitas produksi bisa terwujud.
3. Perbaikan pasca panen dan pemasaran hasil produk.
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan perbaikan pasca panen kentang dengan wortel dalam hal sortasi dan pengepakan yang baik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan perusahaan penerima dan importir.
 - b. Mendorong terjalannya kerja sama pemasaran kentang antara produsen kentang petani secara terorganisir melalui gapoktan/wadah petani lainnya dengan pengusaha dan eksportir (Pemda, Disperindag dan Dinas Pertanian)

- c. Mengembangkan inovasi pengolahan hasil yang berkualitas dalam daerah dalam rangka meningkatkan daya serap penjualan produk mentah (Perguruan tinggi/litbang dan disperindag)

Komoditas Cabe Sebagai Komoditas Unggulan Kab. Merangin.

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dikumpulkan melalui hasil survey, FGD di Bangko Kabupaten Merangin dan Pembahasan pada waktu seminar, bebrapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kecenderungan petani menanam cabe pada daerah perbukitan/lahan miring tidak mengikuti garis contour atau belum mengikuti kaedah konservasi tanah dan air..
2. Petani cabe cederung menggunakan pestisida kimia dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.
3. Fluktuasi harga cabe antara produksi berkurang dengan produksi melimpah sangat tinggi, ketika produksi cabe sedikit harga cabe cenderung sangat tinggi dan ketika produksi cabe melimpah harga cabe sangat rendah dan pentani cenderung merugi..
4. Belum ada perusahaan di Kabupaten Merangin yang mau menanamkan investasinya di bidang inovasi pengolahan hasil cabe.

Langkah langkah yang ditempuh sebagai rekomendasi dalam rangka pengembangan cabe sebagai

komoditas unggulan berdaya saing kabupaten Merangin sebagai berikut. :

1. Melakukan pendampingan dan menggiring petani untuk menerapkan teknis konservasi tanah pada lahan miring dan perbukitan dalam pelaksanaan budi daya cabe.
2. Melaksanakan percontohan penggunaan pestisida nabati untuk mengurangi pemakaian pestisida kimia dalam pengendalian hama dan penyakit.
3. Mengembangkan inovasi pengolahan cabe tahan simpan untuk mengantisipasi kelangkaan cabe segar di pasaran.
4. Pemberdayaan penyuluh dan pemberian bantuan sarana produksi merupakan salah satu kunci keberhasilan pengembangan komoditas cabe sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Merangin
5. Analisis kelayakan usaha dari sisi luas areal dan kesinambungan produksi cabe di Kabupaten Merangin untuk bisa membangun perusahaan pengolahan hasil cabe.

Kedelai Sebagai Komoditas Unggulan Kab. Tebo.

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dikumpulkan melalui hasil survey, FGD di Tebo Kabupaten Tebo dan pembahasan pada waktu seminar, bebrapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kedelai sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Tebo tidak terlepas dari peran serta masyarakat, penyuluh, tokoh adat, pemerintah desa,

kecamatan, kabupaten, dan provinsi, dewan legislasi, akademisi, peneliti, badan litbang pemerintah dan swasta, investor, dan dunia usaha. Kesemua stakeholder ini harus saling bersinergi agar dapat terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangannya untuk dapat meningkatkan daya saing daerah.

2. Di lingkungan pemerintah daerah kabupaten sendiri, Bappeda dan kepala SKPD terkait seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan harus saling bersinergi dalam mengelola komoditas unggulan daerahnya. Dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan, Bappeda harus melibatkan SKPD terkait dan mereka semua harus mempunyai kesamaan persepsi dalam memajukan produk unggulan daerahnya.
3. Pemda setempat dan dewan legislasinya disarankan untuk lebih proaktif dalam mencari solusi-solusi pendanaan misalnya dengan menggandeng pihak swasta melalui program CSR mereka. Bentuk dukungan bisa berupa pembangunan fasilitas pendukung atau pengadaan sarana produksi dan pascapanen kedelai.
4. Pemda setempat dan dewan legislasinya dipandang perlu untuk menjajaki sistem kerja sama dengan perusahaan pemegang izin konsesi lahan hutan tanaman agar dapat memfasilitasi penanaman kedelai di lahan konsesi tersebut saat pergiliran tanam mereka (sehabis dipanen dan sebelum ditanam kembali)
5. Perlu dicari bentuk kemitraan serupa inti-plasma yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dengan jaminan harga jual yang pasti.

6. Pembinaan ketrampilan petani dan pengaplikasian pengetahuan praktis dan teknologi tepat guna dalam budidaya dan penanganan pascapanen kedelai harus menjadi prioritas utama SKPD terkait untuk dapat menghasilkan produk kedelai dengan mutu tinggi.
7. Pemerintah daerah perlu merumuskan kembali bentuk pemberian bantuan kepada petani kedelai di sentra produksinya, pemberian subsidi pupuk dan sarana produksi perlu dikaji ulang dan dialihkan sebagiannya menjadi subsidi harga beli produk saat panen raya (serupa subsidi terhadap harga gabah kering giling pada komoditas padi).
8. Pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan suatu lembaga berupa badan usaha milik daerah yang nantinya bekerja sama dengan BULOG untuk menampung hasil panen kedelai sehingga dapat mengendalikan harga di tingkat petani pada level yang tetap menguntungkan masyarakat.
9. Mengingat kedelai adalah komoditas dengan nilai guna yang tinggi, pengusahaannya dalam skala industri akan memberikan nilai tambah yang signifikan. Pemerintah daerah beserta dewan legisasinya perlu mengundang investor untuk mendirikan pabrik pengolahan kedelai di daerah sentra produksi kedelai di Kabupaten Tebo.
10. Penerapan sistem produksi bersih dan zero waste akan sangat membantu pengusaha kedelai dan UMKM setempat dalam meningkatkan nilai tambah dan nilai ekonomis kedelai.

Langkah langkah yang ditempuh sebagai rekomendasi dalam rangka pengembangan kedelai sebagai

komoditas unggulan berdaya saing kabupaten Tebo sebagai berikut. :

1. Petani perlu ditingkatkan pengetahuannya praktisnya dalam hal budidaya dan pascapanen kedelai dan fungsi penyuluh sebagai pendamping petani harus lebih diintensifkan; petani juga perlu dilengkapi dengan peralatan produksi dan pascapanen yang memadai dalam rangka intensifikasi.
2. Subsidi yang diberikan kepada petani dalam bentuk bantuan pengadaan pupuk dan sarana produksi sebagiannya dapat diubah menjadi subsidi harga jual produk.
3. Kolaborasi antar stakeholder dan sinergisme program di tingkat perencana, pelaksana, akademisi, badan litbang, pengawas, masyarakat, dan dunia usaha harus lebih terintegrasi.
4. Ekstensifikasi produksi memungkinkan dapat terwujud melalui kerja sama pemerintah dan pemegang izin pengelolaan lahan konsesi hutan tanaman yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tebo.
5. Komersialisasi produk olahan kedelai dalam skala industri yang melibatkan investor atau badan usaha milik daerah bekerja sama dengan BULOG adalah salah satu solusi perbaikan harga di tingkat petani.

Padi Sebagai Komoditas Unggulan Kab. Tanjung Jabung Timur

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dikumpulkan melalui hasil survey, FGD di Muara Sabak

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan hasil pembahasan laporan pada waktu seminar, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan agribisnis padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantaranya adalah strategi intensif berupa penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Alternatif strategi penetrasi dan pengembangan pasar yang dapat dilakukan yaitu intensifikasi usahatani padi; sinergi antara petani, pengusaha dan pemerintah; penguatan kebijakan pangan daerah berpihak pada petani; revitalisasi sarana dan prasarana pertanian. Alternatif strategi pengembangan produk dapat dilakukan melalui strategi diferensiasi produk. Prioritas strategi yang harus dilakukan adalah strategi intensifikasi usahatani padi.
2. Rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memajukan pengusahaan komoditas unggulan padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekaligus untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah kabupaten tersebut diantaranya adalah: a) intensifikasi usahatani padi; b) sinergi antara petani, pengusaha dan pemerintah; c) penguatan kebijakan pangan daerah yang berpihak kepada petani; d) revitalisasi sarana dan prasarana; dan e) diferensiasi produk. Strategi yang menjadi prioritas utama dalam penelitian ini adalah strategi intensifikasi usahatani padi.
3. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu membuat dan menguatkan kebijakan-kebijakan otonomi pangan daerah untuk memudahkan manajemen

agribisnis komoditas padi. Hal ini penting untuk mengotimalkan penggunaan sumberdaya pertanian secara efektif dan efisien. Pemberdayaan masyarakat dan petani, program intensifikasi pertanian, penguatan kelembagaan pertanian, serta revitalisasi sarana prasarana pertanian memerlukan aturan khusus agar dapat berjalan secara baik dan benar.

Langkah langkah yang ditempuh sebagai rekomendasi dalam rangka pengembangan padi sebagai komoditas unggulan berdaya saing Kabupaten Tanjung JabungTimur sebagai berikut.

1. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian kepada petani padi di Tanjung Jabung Timur hendaknya disesuaikan dengan tipologi lahan pertanian budidaya yang mereka usahakan, misalnya handtractor jenis amphibi yang biasa digunakan pada lahan gambut dan pasang surut.
2. Untuk memajukan kesejahteraan petani padi di Tanjung Jabung Timur, perlu dilakukan pergiliran tanaman padi sawah dengan komoditas tanaman pangan lainnya seperti palawija, saat ini kedelai hitam (Varietas Malica) telah diuji coba dan memberikan respons positif.
3. Perlu dilakukan reidentifikasi terhadap lahan potensial padi sawah yang termasuk ke dalam Kebijakan LP2B dan mengawalinya secara bersama.
4. Pembangunan jalan usahatani sebagaimana yang telah di program selama ini, perlu dilanjutkan lebih intensif terutama pada lokasi-lokasi potensial lahan usaha tani padi sawah.

5. Perlu diusahakan pengembangan pola kemitraan dengan perusahaan dalam rangka pengawalan dan pembinaan

Pinang dan Kelapa Dalam Sebagai Komoditas Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dikumpulkan melalui hasil survey, FGD di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan hasil pembahasan laporan pada waktu seminar, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pinang merupakan salah satu komoditas perkebunan potensial yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Tanjung Jabung Barat. Komoditas ini merupakan tanaman budaya yang berada pada lahan-lahan usahatani.
2. Pengembangan tanaman pinang di Tanjung Jabung Barat masih banyak menghadapi kendala, diantaranya: keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan pengembangan dan lokasi penanaman yang terlalu jauh, sulit ditempuh karena jalannya rusak dan sebagian harus melewati sungai sehingga waktu tempuh menjadi lama.
3. Agrobisnis dengan komoditi pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memiliki potensi yang bagus kedepan karena pola pengelolannya yang relatif sederhana dan teknologi yang diperlukan pun tidak terlalu tinggi.

4. Dalam mendongkrak produksi pada kegiatan agribisnis pinang, diperlukan pembinaan dari pemerintah daerah, terutama dari segi manajemen, kultur dan etos kerja masyarakat di daerah sentra produksinya.
5. Potensi sumberdaya kelapa di Tanjung Jabung Barat sangat besar yang memungkinkan mengembangkan suatu agribisnis yang kuat dengan struktur industri yang saling terkait dari hulu hingga hilir.
6. Sesuai dengan permasalahan yang ada maka agribisnisperkelapaan perlu mengoptimalkan areal tanaman kelapa melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan pengembangan industri pengolahan serta pemberdayaan petani dan kelembagaannya.

Langkah langkah yang ditempuh sebagai rekomendasi dalam rangka pengembangan pinang dan kelapa sebagai komoditas unggulan berdaya saing Kab.Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tebo sebagai berikut.

1. Pemerintah harus mengusahakan peningkatan keterampilan petani dalam hal budidaya dan pengolahan pinang dan kelapa serta menjalin kerjasama dengan BUMD dan investor agar produk olahannya dapat diekspor dengan mutu dan harga yang layak.
2. Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menyusun kebijakan yang strategis, yang dapat mempercepat agribisnis dan agroindustri pinang dan kelapa, memberikan sumbangan yang berarti dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja di pedesaan,

berkembangnya industri yang memberikan nilai tambah tinggi dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Pembangunan agribisnis kelapa dan pinang perlu mengoptimalkan areal tanaman melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan pengembangan industri pengolahan serta pemberdayaan petani dan kelembagaannya
4. Terminal Agribisnis perlu dibangun untuk pemasaran pinang dan kelapa agar dapat memperbaiki dan menjamin harga di tingkat petani.

6

PENELITIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI PROVINSI JAMBI

Tim Peneliti :

Dr. Susi Desmaryani, SE.MM

Dr. Darmawan, S.Sos, MSi

Sigid Indrawijaya, SE.Msi

1. Pendahuluan

Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan modal kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. (Departemen perdagangan RI, 2008). Persaingan industri saat ini tidak lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.

Industri kreatif merupakan bagian atau sub sistem dari ekonomi kreatif. Industri kreatif dapat didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta industri (Departemen perdagangan RI, 2008).

Industri kreatif terdiri dari 16 sektor diantaranya dari sektor kerajinan, fashion dan kuliner mampu memberi kontribusi besar pada PDB nasional dibandingkan sektor lain pada industri kreatif , menjadi alasan untuk melakukan penelitian industri kreatif di Provinsi Jambi yang menitik beratkan kepada ketiga sektor tersebut yaitu kerajinan, fashion dan kuliner.

Namun di Provinsi Jambi belum ada pemetaan industri yang sudah kreatif dan industri yang belum kreatif . untuk saat ini Industri sektor kerajinan, fashion dan kuliner masih mengalami beberapa permasalahan yang dihadapi,dalam hal ini kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Jambi untuk saat ini belum mampu bersaing dipasar nasional bahkan internasional , terbukti pemasaran untuk saat ini dapat dikatakan masih disekitar wilayah Provinsi Jambi, artinya persentase terbesar hasil produk untuk saat ini hanya di konsumsi masyarakat Jambi. Hanya 3% IKM yang sudah memiliki marketing di luar indonesia seperti kerajinan tas, dan batik. 97% masih bertahan pada pasar domestik, karena belum sanggup menembus pasar internasional (perindustrian, 2013, data diolah). Dapat dibayangkan pasar ASEAN yang kita hadapi sekarang, sangat terkait dengan sumber daya manusia menciptakan produk-pruduk yang dapat bersaing

dengan produk impor.. Oleh karena itu peran pemerintah sebagai motivator, katalisator, dan kordinator dapat menumbuhkan kreativitas dikalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dengan demikian pelaku usaha dapat bertahan, tumbuh dan berkembang.

Untuk tumbuh dan berkembang selain melibatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan motivator, sesungguhnya peran yang sangat penting adalah kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri yang sangat menentukan kinerja industri. Sumber daya manusia adalah elemen dasar yang menjadi subyek atau pelaku pembangunan. Selanjutnya kreativitas dilingkungan pelaku usaha, tidak lepas dari peran cendikiawan sebagai penemu dan tranfer teknologi dan bisnis menopang dan membantu perkembangan industri kreatif. Dalam ekonomi kreatif, sistem Triple Helix menjadi payung yang menghubungkan antara (1) Akademisi (Intellectuals); (2) Bisnis (Business) dan (3) Pemerintah (Government), dimana ketiga helix tersebut merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Sebagai konsep, gagasan utama *Triple Helix* adalah sinergi kekuatan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Kalangan akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologinya memfokuskan diri untuk menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif. Kalangan bisnis melakukan kapitalisasi yang memberikan keuntungan ekonomi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sedang pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif (Etzkowitz&Leydesdorff, 2000).

Berdasarkan permasalahan yang tengah dihadapi oleh Provinsi Jambi yang menggambarkan kesulitan pelaku Industri Kecil dan Menengah memasarkan produk baik dipasar domestik maupun di pasar internasional. Hal ini terjadi karena belum mengarah pada pemanfaatan kreativitas. Untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut bagaimana peran intelektual, bisnis dan pemerintah sehingga dapat melahirkan strategi daya saing industri kecil dan menengah menjadi industri kreatif sehingga mampu survive di tengah-tengah persaingan global , maka dilakukan penelitian tentang strategi pengembangan Industri Kecil Menengah Menuju Industri Kecil Menengah kreatif di Provinsi Jambi.

3. Tujuan

1. Mengetahui gambaran umum Industri Kecil dan Menengah menuju Industri Kecil Menengah kreatif di Provinsi Jambi (industri kerajinan, industri fashion dan industri kuliner).
2. Mengetahui strategi pengembangan Industri Kecil dan Menengah menuju Industri Kecil Menengah kreatif di Provinsi Jambi (industri kerajinan, industri fashion dan industri kuliner).
3. Mengetahui sinergisitas antara intelektual, bisnis dan pemerintah dalam mengembangkan Industri Kecil Menengah menuju Industri Kecil Menengah kreatif.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, Lokasi penelitian dilakukan di 7 (tujuh) Kabupaten dan Kota yaitu, Kabupaten Sungai

Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, Sampel di pilih secara purposive sampling berjumlah 200 yang terdiri dari 75 responden sektor kerajinan, 75 sektor kuliner dan 50 sektor fesyen. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, dokumentasi dan study literature. Analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk melihat kondisi atau gambaran Industri Kecil dan Menengah dan analisis SWOT untuk mengetahui strategi pengembangan Industri Kecil dan Menengah menuju Industri Kreatif.

4. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Industri Kreatif di Provinsi Jambi (Industri Kuliner, Kerajinan dan Fesyen).

Secara rata-rata capaian kinerja Industri Kecil Memengah di Provinsi Jambi dari 57 industri kuliner, kerajinan dan fesyen menuju 57 industri kreatif sebesar 54%, berada dalam kondisi cukup baik. Capaian kinerja persektor yaitu industri kuliner sebesar 52%, Industri kerajinan sebesar 56 % dan Industri Fesyen sebesar 54 %. Dari hasil olah data data ditemui bahwa ketiga sektor yaitu 57sektor kuliner, kerajinan dan fesyen memiliki permasalahan yang sama dalam meningkatkan kemampuan industri menuju industri kreatif, diantaranya adalah (1) masalah kemampuan kemampuan tersebut berupa kemampuan membangun kerjasama dengan dengan industri lain sebagai hilirisasi dari produk, sehingga dapat meminimalisir masalah pemasaran. (2) masalah pembiayaan, rata-rata kelompok industri kecil dan

menengah memiliki kendala modal dalam mengembangkan usahanya, saat ini kondisi pembiayaan yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah yang menunjang perkembangan kemampuan IKM menuju kreatif masih buruk (3) masalah pemasaran, rata-rata IKM baik sektor kuliner, kerajinan dan fesyen memiliki pasar yang sempit dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam usaha memperkenalkan produk IKM tersebut dalam event-event seperti pameran. (4) Infrastruktur dan teknologi, rata-rata IKM dari ketiga sektor tersebut masih berada kondisi buruk, karena sedikit sekali IKM pada ketiga sektor tersebut mengenal dan mempelajari kemajuan teknologi baik dari pemerintah maupun dari perguruan tinggi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. (5) Dari sisi kelembagaan, peran kelembagaan dalam hal ini belum begitu baik terutama dalam hal melindungi produk IKM dalam bentuk penerbitan Hak Kekayaan Intelektual dan peran pemerintah maupun peran kelompok intelektual dalam hal ini perguruan tinggi meningkatkan kemampuan IKM untuk meningkatkan kualitas produk.

Dari sisi kemampuan Industri Kecil dan Menengah menghasilkan produk kreatif dari sisi kebaruan (dimana belum pernah dilaksanakan oleh orang lain, dan merupakan penemuan terbaru (novelty) dan bermanfaat) , hasil penelitian menemukan bahwa ketiga sektor tersebut masih memiliki kemampuan yang buruk yaitu hanya sebesar 40 % mampu membuat perubahan produk yang disukai pasar.

Dari sisi kemampuan Industri Kecil dan Menengah menghasilkan produk kreatif yang mampu memecahkan solusi atau menambah kegunaan produk yang selama ini

diinginkan konsumen atau menemukan solusi bagi produsen bekerja lebih efektif dan efisien hanya sebesar 48 % dan berada pada kondisi buruk Kemudian Elaborasi dan sintesis merujuk sejauh mana produk menggabungkan unsur-unsur yang tidak sama atau serupa menjadi sesuatu yang hebat, dan canggih, sampai saat ini baru sekitar 25% IKM di Provinsi Jambi yang memiliki kemampuan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKM pada 3 (tiga) sektor tersebut yaitu kuliner, kerajinan dan fesyen meskipun sudah cukup baik, namun dalam proses menuju industri kreatif masih belum memiliki kreatifitas yang baik (tingkat kreativitas masih buruk) , dimana tingkat kreativitas yang dimiliki IKM saat ini untuk sektor kuliner, kerajinan dan fesyen hanya memiliki tingkat kreativitas sebesar 34,5%. Dan didukung daya jual hanya sebesar 35,% meningkat, 45,5% memiliki penjualan tetap dan 20% menurun.

Ketidakmampuan IKM di Provinsi Jambi untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki kreativitas disebabkan masih memiliki permasalahan dalam kemampuan industri, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan kelembagaan. Selain itu sangat diperlukan dukungan pemerintah dan kaum intelektual (dalam hal ini perguruan tinggi) untuk mengembangkan usaha IKM baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itu pemerintah lebih intensif meningkatkan kemampuan IKM secara intensif dan merata memperkaya *knowledge* IKM melalui pelatihan-pelatihan dan memperkenalkan teknologi yang dibutuhkan oleh IKM dengan bekerja sama dengan intelektual dalam hal ini perguruan tinggi sebagai aktor inovator untuk menggali dan mengembangkan kreativitas IKM.

5. Rekomendasi

1. Dinas perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pariwisata membantu memperkenalkan produk dalam event-event pameran secara merata untuk semua produk IKM. Untuk sektor kuliner membuat leaflet yang mencantumkan macam-macam khas kuliner Jambi, yang diletakan ditempat-tempat yang memiliki banyak pengunjung khususnya tempat-tempat yang sering didatangi wisatawan seperti hotel, bandara, tempat rekreasi dan lai-lain.
2. Pemerintah membuat peraturan yang menyatakan bahwa perusahaan besar harus berpartisipasi dan bekerjasama dengan perusahaan kecil misalnya sebagai pengguna bahan baku atau penyalur hasil produksi. Sehingga tercipta aturan yang bisa mengharmonisasikan hubungan antara usaha kecil, menengah dan besar menjadi satu rantai nilai.
3. Memperbaiki dimensi pembiayaan dengan membentuk lembaga pemberdayaan keuangan mikro yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat, dan juga membentuk lembaga mediator antara perbankan dan pelaku usaha yang fungsinya sebagai mediator penyaluran kredit dan juga bertindak sebagai *technical assistance* yang membantu pelaku usaha dalam mengembangkan SDM dan kelembagaannya.
4. Memperbaiki dimensi infrastruktur dan tehnologi serta kelembagaan, dimana pemerintah dan perguruan tinggi harus bekerjasama dan lebih aktif mengikuti perkembangan tehnologi dengan melakukan penelitian

dan pengembangan sehingga alih pengetahuan dan alih teknologi dapat berjalan dengan baik.

5. Melaksanakan strategi agresif, agar dapat bersaing dan mampu menciptakan kreativitas sektor kuliner, kerajinan dan fesyen:
 - a. Melakukan uji kemampuan IKM, untuk memetakan kelompok IKM sudah kreatif dan yang belum kreatif.
 - b. SKPD terkait (dinas koperasi dan dinas perindustrian, dinas pariwisata) yang membina IKM harus memiliki sinergisitas untuk membuat program yang mengarah pada penciptaan kreativitas IKM untuk mewujudkan IKM kreatif, untuk itu perlu kebijakan konfrehensif dan koordinasi lintas instansi.
 - c. IKM yang sudah dipetakan berdasarkan kemampuan diberi pelatihan dengan melakukan alih pengetahuan dan alih teknologi.
 - d. Mendirikan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO) untuk mengaudit mutu produk, sehingga produk memiliki standar mutu.
 - e. Pemerintah melalui SKPD terkait bekerjasama dengan perusahaan besar maupun BUMD membangun kerjasama dalam bentuk pola kemitraan, sehingga mampu bersaing dari sisi harga dan kualitas
 - f. Mengembangkan potensi daerah seperti mengembangkan fungsi bahan baku, melalui *research* sehingga mampu menemukan sesuatu yang baru dan mempunyai *value added*.

- g. Pemerintah Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan bisnis untuk menerapkan hasil-hasil penelitian.
 - h. Melakukan penataan dan perbaikan sistem pelatihan secara menyeluruh yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang mengarah kepada kreativitas, kemampuan berfikir kritis, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi dan membangun jejaring dengan orang-orang yang mendukung dunia usaha.
6. Pemerintah membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dan bisnis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, hasil penelitian diaplikasikan dan digunakan oleh IKM menghasilkan produk-produk yang berdaya saing, memiliki kreativitas dan inovasi. untuk itu perlu dibentuk sebuah bidang di lingkungan litbang yang memfasilitator, mengkoordinator dan mengkatalisator kegiatan “triple helix”,
7. Pemerintah Daerah membuat PERDA tentang ekonomi kreatif sehingga model strategi pengembangan industri kecil menengah menuju ekonomi kreatif di Provinsi Jambi dapat di implementasikan dengan baik.
8. Saat ini belum ada pemetaan kelompok industri kreatif, untuk itu dinas perindustrian melakukan pemetaan kelompok industri kreatif yang di publikasi dalam data BPS.

7

**KAJIAN KEPUASAN NASABAH
TERHADAP PELAYANAN BANK JAMBI
DI PROVINSI JAMBI****Tim Peneliti :**

Dr. Susi Desmaryani, SE, MM
Dr. Darmawan, S.Sos. M.Si
Adi Rahman, SE

1. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit. Persaingan antar bank di Indonesia dewasa ini semakin kompetitif ditandai dengan munculnya bank-bank baru. Kondisi tersebut menyebabkan pihak perbankan dituntut untuk segera menyesuaikan kebijakan dan strategi guna memenangkan atau setidaknya mempertahankan nasabah yang merupakan sumber penghasilan bank agar tetap *survive*.

Kualitas layanan adalah cara untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan pelanggan. Kepercayaan sangat diperlukan untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang (Akbar dan Parves, 2009). Pelanggan yang dapat merasakan kualitas layanan bank sesuai dengan harapan akan merasakan tingkat kepuasan.

Industri perbankan harus mulai memikirkan pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang melalui kualitas pelayanan, kini semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan (Tjiptono, 2002).

Kualitas layanan yang diberikan bank erat hubungannya dengan kepuasan pelanggan, dengan demikian bank harus profesional dan mengedepankan kualitas layanan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang sangat berharga demi mempertahankan keberadaan pelanggannya tersebut untuk tetap berjalannya suatu bisnis atau usaha (Chandra dan Danny, 2001). Menurut Schnoor dalam Tjiptono (2002), pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada pelanggan yang akan memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan serta adanya rekomendasi kepada oranglain dari mulut ke mulut, sehingga akan tercipta pelanggan baru. Cronin (1992), mengemukakan adanya hubungan yang signifikan positif antara kualitas pelayanan (*service quality*) terhadap kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), dan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transaksi ulang.

Keterkaitan antara kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan dapat memberikan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka mendapatkan keuntungan kompetitif di sektor ritel perbankan (Siddiqi, 2011). Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan yang mempengaruhi daya saing organisasi. Sebuah bank dapat

membedakan dirinya dari pesaing dengan menyediakan layanan berkualitas tinggi. Kumar *et al.* (2010) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian ini juga didukung oleh Naeem dan Saif (2009) dan Sanka (2012). Salah satu faktor penting untuk memperoleh kepuasan pelanggan adalah melalui hubungan yang baik antara karyawan dan nasabah (Levesque dan Mc Dougall dalam Siddiqi, 2011). Karyawan yang dengan segera bisa menyelesaikan masalah dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Melalui kepuasan, perusahaan berusaha membentuk loyalitas. Pfeifer (2005) menyatakan bahwa biaya melayani pelanggan yang setia adalah lima atau enam kali lebih kecil dibandingkan pelanggan baru. Ini menunjukkan betapa pentingnya loyalitas pelanggan bagi perusahaan. Lebih baik menjaga pelanggan yang sudah ada sebelum memperoleh pelanggan baru (Walsh *et al.* 2005).

Pengalaman membuktikan, nasabah-nasabah yang puas akan membangun *customer based* yang lebihkokoh untuk perkembangan masa depan sebuah bank. Dengan memperbesar *customer based* diharapkan nasabah tidak rentan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di industri perbankan. Dengan kata lain dapat digambarkan bahwa kualitas pelayanan merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan kualitas jasa yang dihasilkan. Jika pelayanan yang diberikan nasabah itu baik dan memuaskan maka akan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja usaha, sebaliknya pelayanan yang diberikan kepada nasabah kurang memuaskan maka akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan (Simamora, 2007).

Bank Pembangunan Daerah di Provinsi Jambi yang sekarang dikenal dengan nama Bank Jambi, merupakan satu-satunya bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan akte notaris Adi Putra Parlindungan No.6 tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan melalui akte notaris Habropoerwanto No. 70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959 dan dimuat pada tambahan berita negara RI No. 110.104 tanggal 29 Desember 1963 dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 9/32/127-164 tanggal 25 September 1964, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Bank Jambi yang dalam kegiatannya berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1992 jo undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Sejak tanggal 22 November 2007, Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT.) Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut Bank Jambi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2006 dan berdasarkan Akta Notaris Robert Faisal, SH. No.1 tanggal 1 Februari 2007. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. W20-00061 HT.01.01-TH.2007 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/59/KEP.GBI/2007 tanggal 13 November 2007.

Bank Jambi memiliki peluang untuk berkembang secara optimal, namun Bank Jambi yang merupakan Bank Pembangunan Daerah secara umum memiliki beberapa permasalahan antara lain : (1) Kondisi permodalan Bank Jambi masih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata permodalan industri perbankan nasional lain seperti Bank BRI, Mandiri, BCA dan sebagainya. Hal ini dapat berpotensi melemahkan ketahanan Bank Jambi dalam menghadapi persaingan dengan kelompok bank lainnya yang ada di daerah, (2) Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang belum memenuhi harapan dalam mengantisipasi perkembangan pasar, sehingga kurang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, (3) Penyaluran kredit kepada sektor produktif masih relatif rendah tetapi lebih cenderung menyalurkan kredit konsumtif untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyebabkan belum optimalnya peran Bank Jambi dalam pembiayaan sektor riil di daerah. Hal ini mengakibatkan pembiayaan untuk sektor produktif berpotensi dilakukan oleh bank lain sehingga semakin sulit bagi BPD untuk menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. (4). Masih minimnya produk dan pelayanan berbasis teknologi informasi seperti nasabah prioritas, *internet banking*, dan *sms banking*.

Empat permasalahan umum di atas jika tidak ditanggapi secara serius akan berdampak pada kinerja bank. Untuk itu Bank Jambi harus meningkatkan kinerja dengan memberi kualitas layanan sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga pelanggan yang berperan sebagai sumber pendapatan dan sumber bertahan bank akan tetap setia menggunakan jasa bank dan memiliki loyalitas terhadap bank. Permasalahan lain adalah komposisi nasabah Bank Jambi untuk masyarakat umum masih

sedikit jika dibandingkan dengan nasabah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan umum selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum melirik kepada layanan produk yang disediakan Bank Jambi harus ditelusuri, salah satu penyebabnya adalah tingkat layanan dan fitur produk yang belum memenuhi harapan masyarakat luas. Untuk itu penelitian ini akan mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah dalam menggunakan jasa layanan Bank Jambi.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana gambaran kepuasan nasabah, harapan nasabah atas pelayanan yang diterima dan loyalitas nasabah pada Bank Jambi.
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah
3. Faktor apa yang paling dominan dari kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan nasabah.
4. Bagaimana kinerja Bank Jambi melalui tingkat kepuasan nasabah yang dirasakan ketika dibandingkan dengan harapan.
5. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Bank Jambi.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian adalah :

1. Mengetahui gambaran kepuasan nasabah, harapan nasabah atas kepuasan yang diterima dan loyalitas nasabah pada Bank Jambi
2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah
3. Faktor apa yang paling dominan dari kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan nasabah
4. Mengetahui kinerja Bank Jambi melalui tingkat kepuasan nasabah yang dirasakan ketika dibandingkan dengan harapan
5. Mengetahui bagaimana strategi untuk meningkat kualitas layanan Bank Jambi untuk meningkatkan strategi bersaing.

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jambi, dapat dijadikan sebagai masukan untuk pengembangan Bank Jambi sebagai Bank milik Pemerintah Daerah dan juga sebagai upaya dalam mendukung Visi Misi Jambi TUNTAS 2021 (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera).
2. Bagi akademisi dan peneliti, sebagai sumbangan pemikiran dan referensi keilmuan.
3. Bagi Bank Jambi, sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas layanan, sehingga Bank Jambi dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan.

5. Kesimpulan

1. a. Secara umum tingkat kepuasan nasabah Bank Jambi berada dalam kategori Puas, tingkat kepuasan yang dirasakan nasabah masih di bawah harapan yang diukur melalui 5 (lima) dimensi, kualitas pelayanan Bank Jambi paling rendah berada pada dimensi *Tangible* (fisik).
- b. Tingkat kepuasan antara nasabah yang ada di wilayah kota dan wilayah kabupaten berbeda, dimana tingkat kepuasan nasabah di wilayah kabupaten lebih tinggi dari pada tingkat kepuasan nasabah yang ada di wilayah kota. Hal ini dikarenakan standar kebutuhan masyarakat kota lebih tinggi dalam melakukan aktivitas-aktivitas transaksi.
- c. Secara umum loyalitas nasabah berada dalam kategori cukup loyal, loyalitas paling rendah adalah loyalitas primer, yaitu nasabah masih belum merasa cocok dengan Bank Jambi, dan masih menggunakan jasa Bank lain, sehingga proses rekomendasi tentang keunggulan Bank Jambi dari nasabah ke calon nasabah belum berjalan sesuai harapan. Sementara itu untuk dimensi loyalitas, paling tinggi berada pada loyalitas kosong dimana nasabah masih bersifat asal ikut bergabung saja menjadi nasabah Bank Jambi
- d. Tingkat loyalitas nasabah kabupaten lebih tinggi dari pada tingkat loyalitas nasabah yang ada di wilayah kota.

2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah, artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank Jambi maka nasabah akan semakin puas terhadap pelayanan yang diterima.
3. Faktor dominan dari kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan nasabah adalah dimensi *Tangible*.
4. Kinerja Bank Jambi dari sisi kualitas pelayanan belum optimal, Bank Jambi belum mampu memenuhi harapan nasabah dimana jenis pelayanan yang diharapkan nasabah belum sesuai dengan apa yang dirasakan, pelayanan yang diberikan Bank Jambi masih dibawah harapan.
5. Analisis Strategi SWOT, menghasilkan posisi Bank Jambi lemah dan memiliki tantangan yang besar. Strategi yang tepat adalah strategi bertahan, dimana Bank Jambi harus bekerja keras meningkatkan kinerja agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan nasabah.

6. Saran

1. Dari sisi dimensi *tangible* (sarana fisik), yang menjadi prioritas yaitu memperbanyak jumlah jaringan ATM di pusat-pusat perbelanjaan atau tempat-tempat strategis lain, Bank Jambi juga perlu menyediakan kotak saran/pengaduan nasabah, sarana komunikasi dan promosi berupa brosur/buletin/majalah. Untuk prioritas selanjutnya yang tidak boleh diabaikan oleh Bank Jambi

adalah peningkatan tampilan gedung kantor, kenyamanan ruangan dengan fasilitas penunjang seperti penyediaan penyejuk ruangan (AC) yang memadai, *wifi* internet gratis, tempat charger hp/laptop di ruang antrean, toilet dan Musholla yang nyaman.

2. Pada dimensi *Responsiveness* (tanggap reaksi) dan dimensi *Reliability*, Bank Jambi perlu meningkatkan pelayanan dalam hal kecepatan dan ketepatan transaksi, kecepatan antrian, tanggapan atau (*respon*) pegawai bank kepada nasabah, kemudahan prosedur pelayanan dan meningkatkan kualitas cara berkomunikasi kepada nasabah seperti memberi senyum, dan mengucapkan kata maaf jika membuat nasabah merasa tidak nyaman.
3. Bank Jambi perlu meningkatkan loyalitas nasabah dengan memberikan nilai lebih pelayanan seperti membuat program peduli nasabah misalnya dengan memberikan fasilitas konsultasi kesehatan gratis bagi nasabah, pemberian *reward* berupa cinderamata bagi nasabah yang aktif lebih dari 5 (lima) tahun atau saldo minimal tertentu, bantuan sosial bagi nasabah aktif yang anggota keluarganya meninggal dunia atau bantuan sosial bagi nasabah yang memiliki anak baru (kelahiran).
4. Bank Jambi juga perlu segera menyediakan fasilitas produk yang berbasis teknologi modern yang sangat dibutuhkan oleh nasabah pada saat ini seperti fasilitas *sms banking* dan *internet banking*.
5. Bank Jambi juga perlu meningkatkan daya tarik dengan memperluas layanan semacam Nasabah Prioritas dengan persyaratan yang lunak sehingga bisa dijangkau

oleh berbagai segmen ekonomi nasabah, misalnya setoran minimal Rp.100.000.000,- akan memperoleh pelayanan bebas antrian, ruang VIP, dan diberikan fasilitas jemput setoran maupun tagihan dengan nominal tertentu.

6. Bank Jambi perlu menambah jumlah personil di bagian pelayanan nasabah (*front office*) dan juga meningkatkan kualitas SDM melalui pemberian pelatihan–pelatihan yang berhubungan dengan *Service Excellent*.
7. Bank Jambi juga perlu meningkatkan pembinaan dan pemberian *reward* bagi pegawai yang berkinerja baik dan pemberian *punishment* bagi pegawai yang sulit dibina, sehingga SDM akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik untuk memenuhi harapan nasabah.
8. Bank Jambi perlu memperluas kerjasama pengumpulan dana pihak ketiga (DPK), seperti kerjasama dengan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) baik SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota maupun yang mengelola dana dari APBD maupun APBN. Bentuk kerja sama antara lain berupa penyaluran gaji, dana tunjangan guru (sertifikasi), penyaluran dan Bantuan Operasional Sekolah, Pembayaran Tabungan Hari Tua, pengelolaan dana desa, dan pengelolaan dana lain yang potensial. Disamping itu Bank Jambi juga perlu menjajaki kerjasama dengan perusahaan swasta maupun asing.
9. Bank Jambi juga perlu meningkatkan promosi dan memperkuat *branding* bahwa Bank Jambi adalah milik daerah Jambi yang bukan hanya untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Promosi dilakukan melalui

media cetak dan elektronik (tv lokal), dan juga dilakukan secara langsung (*door to door*) ke berbagai perusahaan swasta, pasar-pasar, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, komunitas olah raga, komunitas seni, komunitas agama (umroh, haji). Disamping itu Bank Jambi juga diharapkan dapat menjadi sponsor dalam event-event potensial yang diadakan oleh komunitas tersebut.

10. Khusus kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota agar turut mempromosikan Bank Jambi dan menggalakkan program Aku Cinta Bank Jambi kepada kepada masyarakat luas, sehingga diharapkan akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa Bank Jambi. Disamping itu Pemerintah Provinsi Jambi juga perlu membuat kebijakan agar transaksi penyaluran dana yang bersumber dari APBD maupun APBN menggunakan jasa Bank Jambi, seperti penyaluran gaji pegawai, dana pensiun dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan Bank Jambi dapat tumbuh dengan baik di negeri sendiri dan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah.

8

PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN ZAT PEWARNA BATIK ALAM JAMBI

Tim Peneliti :

M. Rialdi Syaputra, SE
Syamsuddin

a. Latar belakang

Seni batik merupakan karya warisan budaya bangsa Indonesia yang telah mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan waktu. Perkembangan yang terjadi telah membuktikan bahwa seni kerajinan batik sangatlah dinamis dan dapat menyesuaikan dirinya baik dalam dimensi bentuk, ruang, dan waktu.

Inovasi dalam ragam motif, corak, serta warna, merupakan salah satu inovasi yang paling penting diterapkan dalam industri batik yang tergolong produk seni dan mengandung unsur budaya lokal ini. Inovasi dalam ragam motif, corak, serta warna, menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing batik dalam perdagangan, karena yang pertama kali diperhatikan dan memikat konsumen adalah ragam motif, corak, serta warna yang dimiliki oleh sehelai kain batik yang memancarkan keindahan seninya

Meningkatnya persaingan dalam industri tekstil, menyebabkan adanya tuntutan terhadap variasi

warna. Kemajuan teknologi mampu menciptakan zat warna sintetis dengan berbagai variasi warna. Namun limbah zat warna sintetis ini menimbulkan pencemaran lingkungan, sehingga pewarna alam kembali dilirik menjadi suatu alternatif.

Zat warna alam untuk bahan tekstil pada umumnya diperoleh dari hasil ekstrak berbagai bagian tumbuhan seperti akar, kayu, daun, biji ataupun bunga. Pengrajin-pengrajin batik telah banyak mengenal tumbuhan-tumbuhan yang dapat mewarnai bahan tekstil beberapa diantaranya adalah daun pohon nila (*Indofera*), kulit pohon soga tinggi (*Ceriops candolleana*), kayu tegeran (*Cudrainajavanensis*), kunyit (*Curcuma*), akar mengkudu (*Morinda citrifolia*), kulit soga jambal (*Peltophorum ferruginum*), kesumba (*Bixa orellana*) dan daun jambu biji (*Psidium guajava*).

Di Jambi telah lama menggunakan pewarna alam seperti kayu ramelang untuk warna kecoklatan, kayu lambato untuk warna kuning, kayu sepag untuk warna kuning kemerahan dan nilo untuk warna biru. Kayu bulian yang khas Jambi jika dicampur dengan kayu tinggi dari Yogyakarta dapat menghasilkan warna coklat muda. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Jambi melalui pelatihan khusus untuk mengiatkan penggunaan pewarna alam bagi pengrajin batik lokal. Salah satu kendala pewarnaan tekstil menggunakan zat warna alam adalah ketersediaan variasi warnanya sangat terbatas dan ketersediaan bahannya yang tidak siap pakai sehingga diperlukan proses-proses khusus untuk dapat dijadikan larutan pewarna tekstil.

Namun dibalik kekurangannya tersebut zat warna alam memiliki potensi pasar yang tinggi sebagai komoditas unggulan produk Indonesia memasuki pasar global dengan daya tarik pada karakteristik yang unik, etnik dan eksklusif. Untuk itu, sebagai upaya mengangkat kembali penggunaan zat warna alam untuk tekstil maka perlu dilakukan pengembangan zat warna alam dengan melakukan kajian dan inovasi sumber-sumber zat warna alam dari potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara kualitatif warna yang dihasilkan oleh berbagai tanaman di sekitar kita untuk pencelupan tekstil khususnya batik. Dengan demikian hasilnya dapat semakin memperkaya jenis – jenis tanaman sumber pewarna alam sehingga ketersediaan zat warna alam selalu terjaga dan variasi warna yang dihasilkan semakin beragam.

4. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : a) Mengetahui teknologi pengolahan zat pewarna batik dari alam yang berasal dari tumbuhan lokal, b) Melakukan kajian dan sosialisasi diversifikasi pewarna alam kain batik untuk mendapatkan bahan alternatif yang mudah didapatkan sebagai substitusi pewarna alam agar tidak terlalu tergantung bahan pewarna kimia/sintesis, serta mendorong pemanfaatan bahan lokal dan alam yang ramah lingkungan dan c) Mengembangkan penggunaan pewarnaan alam dari tumbuh-tumbuhan alam sekitar untuk memajukan industri batik lokal di Provinsi Jambi.

5. Analisis Hasil Uji Coba Penerapan Teknologi Pewarnaan Alam Batik Jambi

Ekstraksi dari enam jenis zat warna alam, yaitu daun jambu biji, kulit jengkol, serbuk kayu bulian, daun inai, kulit kayu tingi, jalawe menggunakan perbandingan penambahan air 1 : 6 kemudian dilakukan pewarnaan terhadap bahan kain. Selanjutnya dengan perlakuan fiksasi (kapur, tawas dan tunjung) dan tanpa fiksasi. Pengujian dilakukan terhadap ketahanan luntur warna terhadap pencucian dengan celupan dingin, gosokan dan ketahanan luntur warna terhadap sinar matahari. Kemudian diberikan penilaian. Nilai 2 : Kurang Baik, Nilai 3 : Cukup Baik, Nilai 4 : Baik dan Nilai 5 : Sangat Baik. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uji Ketahanan Luntur Warna Kain Katun
dan Sutra Tanpa Fiksasi

No	Jenis Zat Warna Alam	Pencucian Celupan Dingin	Gosokan	Sinar Matahari
1	Daun Jambu Biji	4	4	3-4
2	Serbuk Kayu Bulian	4	4	3
3	Kulit Jengkol	4	4-5	4
4	Daun Inai	4	4	3-4
5	Kulit Kayu Tingi	4	3-4	4
6	Jalawe	4	4	4

Hasil pengujian pada Tabel di atas ketahanan luntur warna terhadap pencucian pada kain katun dan sutra dengan pematikan tanpa fiksasi rata-rata memberikan nilai

baik dengan skor 4(empat). Perlakuan ekstraksi dengan perbandingan 1 : 6 mempunyai ketahanan luntur warna terhadap gosokan dan sinar matahari rata-rata cukup baik sampai baik. Pada zat warna kulit buah jengkol dengan semua perlakuan ekstraksi masih memberikan ketahanan luntur warna terhadap pencucian, gosokan dan sinar terang yang baik dengan nilai 4 dan sangat baik nilai 4 –5. Kekuatan serat kapas dipengaruhi oleh kadar selulosa dalam serat kain katun yang mampu menyerap zat warna alam, sehingga pada kain katun tanpa perlakuan fiksasi mampu mengikat warna dengan baik sehingga tahan dalam pencucian dan sinar terang hari.

Uji Ketahanan Luntur Warna Kain Katun dan Sutra
dengan Fiksasi Kapur

No	Jenis Zat Warna Alam		Pencucian Celupan Dingin	Gosokan	Sinar Matahari
1	Daun Biji	Jambu	4	4	3
2	Serbuk Bulian	Kayu	3	4	4
3	Kulit Jengkol		4 -5	4 -5	4
4	Daun Inai		4	4	3
5	Kulit Kayu Tingi		3-4	3	3-4
6	Jalawe		4-5	3-4	3

Ketahanan luntur warna terhadap pencucian celupan dingin kain batik katun dengan perlakuan fiksasi

menggunakan kapur menunjukkan nilai 3 (Cukup baik), 4 (baik) sampai nilai 5(sangat baik). Selanjutnya ketahanan luntur warna terhadap sinar matahari memberikan hasil yang bervariasi nilai 3(cukup baik) sampai nilai 4 (baik).Hasil pengujian terlihat bahwa ketahanan luntur warna terhadap pencucian celupan dingin dengan perlakuan ekstraksi tidak menunjukkan perbedaan pada keenam zat warna alam, dan ketahanan luntur warna akibat pencucian lebih baik dibanding dengan ketahanan luntur warna terhadap sinar matahari.Kulit buah jengkol mempunyai ketahanan luntur warna paling baik dengan fiksasi kapur.

Kulit buah jengkol mengandung polifenol,termasuk xanthonen dan tanin. Perlakuanfiksasi dengan kapur dapat mengakibatkan meningkatnya daya serap kain katun terhadap zat warna alam dan untuk mengunci zat warna yang masuk kedalam serat.

Perlakuan ekstraksi menggunakan perbandingan jumlah air dan bahan pewarna memberikan hasil ketahanan warna kainkatun dan sutra setelah pencelupan yang berbeda bedater gantung bahan pewarna yang diekstrak.

Zat warna daun jambu biji menghasilkan ketahanan warna terhadap pencucian celupan dingin dan pengosokan yang baik, tetapi kurang baik terhadap sinar matahari.Daun inai, serbuk kayu bulian rata-rata cukup baik sampai baik dan paling baik pada kulit buah jalawe mempunyai ketahanan warna baik sampai sangat baik.

Menurut Rita (2010) dalam Triani dkk (2012) dikatakan bahwa untuk pewarnaan tekstil dan batik dapat menggunakan bagian tumbuhan yaitu kulit, biji buah dari

bagian senyawa polarnya yaitu norbixin. Senyawa bixin dan norbixin mempunyai sifat kelarutan berbeda yaitubixin tidak dapat larut dalam air dan norbixin larut dalam air dan keduanya merupakan golongan pigmen karotenoid.

Penggunaan fiksasi tawas pada pewarnaan kain katun dan sutra, dengan ekstraksi menggunakan air 1 : 6 pada enam jenis bahan pembawa warna memberikan hasil ketahanan luntur warna terhadap pencucian celupan dingin dengan nilai 4 (baik) dan nilai 5 (sangat baik). Hasil ketahanan luntur warna terhadap gosokan dan sinar matahari pada daun jambu biji dan kayu tingi memberikan nilai 4-5 (baik hingga sangat baik).

Uji Ketahanan Luntur Warna Kain Katun dengan
Fiksasi Tawas

No	Jenis Zat Warna Alam	Pencucian Celupan Dingin	Gosokan	Sinar Matahari
1	Daun Jambu Biji	4	4	4
2	Serbuk Kayu Bulian	4	4	3
3	Kulit Jengkol	4 -5	4 -5	4
4	Daun Inai	4	4	4
5	Kulit Kayu Tingi	4	3	3
6	Jalawe	4	3	4

Penggunaan fiksasi tunjung padapewarnaan kain katun dan sutra, dengan ekstraksi menggunakan air 1 : 6 pada enam jenis bahan pembawa warna memberikan hasil ketahanan luntur warna terhadap pencucian celupan dingin dengan nilai 4 (baik) dan nilai 5 (sangat baik). Hasil

ketahanan luntur warna terhadap gosokan dan sinar matahari pada kulit buah jengkol, daun jambu biji daun inai dan jalawe memberikan nilai 4-5 (baik hingga sangat baik).

Uji Ketahanan Luntur Warna Kain Katun
dengan Fiksasi Tunjung

No	Jenis Zat Warna Alam		Pencucian Celupan Dingin	Gosokan	Sinar Matahari
1	Daun	Jambu Biji	4-5	4	4
2	Serbuk	Kayu Bulian	4	4	3
3	Kulit Jengkol		4 -5	4 -5	4
4	Daun Inai		4	4	4
5	Kulit	Kayu Tingi	4-5	3-4	4
6	Jalawe		4	4	4

Keenam jenis zat warna alam mempunyai arah warna yang berbeda dan perlakuan fiksasi dapat mempengaruhi arah warna menjadi berbeda dengan warna tanpa perlakuan fiksasi. Secara organoleptic warna dari masing-masing bahan sebelum fiksasi adalah daun jambu biji memberikan coklat muda, serbuk kayu bulian warna coklat muda, kulit jengkol kearah warna coklat tua, daun inai memberikan warna coklat muda, kulit kayu tingi coklat tua dan jalawe memberikan warna kuning kecoklatan. Hasil pencelupan keenam jenis ekstrak zat warna alam dengan perbandingan 1 : 6 dan perlakuan fiksasi seperti pada Tabel 1,2, 3, dan 4.

Bahan telah selesai diwarnai dengan larutan zat warna alam diamati warna yang dihasilkan dan perbedaan

warna pada bahan tekstil setelah di *fixer* dengan masing-masing larutan *fixer*. Kemudian akan disajikan dalam tabel warna sehingga mendapatkan kesimpulan potensi tanaman yang diproses (diekstrak) sebagai sumber zat pewarna alam untuk mewarnai bahan tekstil.

6. Kesimpulan

Ekstraksi zat warna alam dengan perbandingan 1 : 6 menghasilkan zat warna yang dapat diaplikasikan pada pembatikan kain katun dan sutra dan memberikan hasil yang tidak jauh berbeda.

Perlakuan yang memberikan ketahanan luntur baik adalah: daun jambu biji, kulit buah jengkol, tingi dan jelawe dengan fiksasi kapur, tawas dan tunjung dan tanpa fiksasi.

7. Saran

1. Kain batik katun dan sutra sebaiknya tidak dijemur pada sinar matahari langsung.
2. Penggunaan zat warna alam lokal yang terdapat di sekitar lingkungan seperti daun jambu, kulit buah jengkol, serbuk kayu bulian, daun inai tidak jauh berbeda dalam kualitas zat warna alamnya dibandingkan dengan zat warna alam yang berasal dari luar seperti tingi dan jelawe.

9

PENELITIAN MANDIRI UNTUK ISU-ISU AKTUAL

Penelitian Mandiri Untuk Isu-isu Aktual, terdiri dari 9 (Sembilan) judul / topik penelitian, yang dilakukan oleh Sembilan orang peneliti pada Balitbandga Provinsi Jambi, adapun judul / topik penelitian dimaksud antara lain :

I. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Jambi (Peneliti : Adi Rahman, SE)

1. Latar Belakang

Secara umum diketahui bahwa dinamika pembangunan ekonomi wilayah, baik wilayah suatu negara, wilayah provinsi maupun wilayah suatu kabupaten/kota dapat di indikasikan oleh beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan (*gini ratio*) akan menghasilkan output yang tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di suatu wilayah. Selama ini para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan pembangunan suatu wilayah adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.

Para ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Perry et al, 2006). Manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebar ke semua lapisan masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada teori *trickle down effect* yang sangat dominan dalam teori-teori pembangunan pada era 1950 an dan 1960 an. Teori *trickle down effect* menyebutkan adanya rembesan aliran kebawah, dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui fungsi-fungsi dalam ekonomi. (Hajiji, 2010).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kapasitas perekonomian dan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita yang meningkat berarti kesejahteraan masyarakat meningkatkan pula yang berarti akan mengurangi tingkat kemiskinan. Jadi pertumbuhan ekonomi berdampak baik terhadap pengentasan kemiskinan.

Studi-studi empiris menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi kuat dalam pengentasan kemiskinan. Hubungan ini berupa hubungan positif yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan. (Chen dan Ravallion, 1997; Osmani, 2000: Dollar dan Kraay, 2002; Warr, 2006). Warr menyebutkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi atau dengan redistribusi pendapatan. (Hajiji 2010).

Siregar, 2006 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupan (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut harus menyebar disetiap golongan

pendapatan, termasuk pada golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung hal tersebut berarti bahwa pertumbuhan itu harus terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor padat karya) sedangkan secara tidak langsung hal tersebut berarti bahwa pemerintah perlu meredistribusi manfaat pertumbuhan secara efektif yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

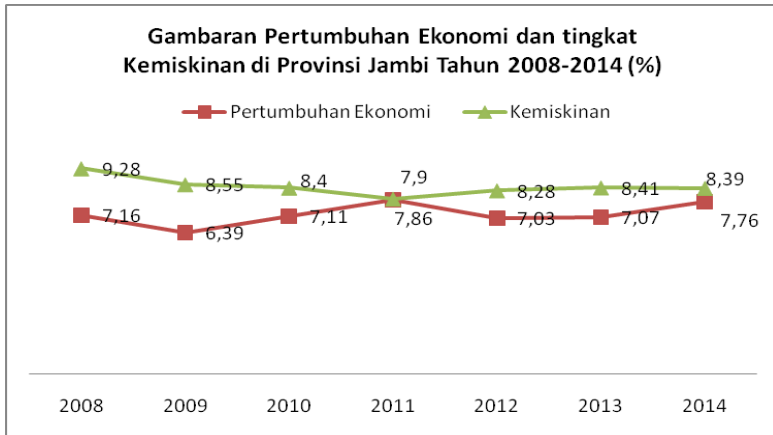
Wongdesmiwati 2009 dalam Harlik dkk, 2013 juga menyatakan bahwa proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara merupakan syarat bagi terciptanya penurunan kemiskinan. Memang pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagaimanapun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan.

Idealnya, pembangunan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya manfaat pertumbuhan ekonomi tidak otomatis dinikmati oleh seluruh masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan data rasio gini Indonesia yang menunjukkan tren meningkat dalam 9 tahun terakhir sejak 2007 hingga 2015 yaitu berturut-turut 0.36 0.35 0.37 0.38.0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 (BPS), yang artinya disparitas

atau kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin semakin jauh.

Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan juga terjadi di Provinsi Jambi. Meski kinerja perekonomian di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang ditandai dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, namun pada kenyataannya, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi secara makro belum sepenuhnya dapat mempengaruhi proporsi kesejahteraan masyarakat. BPS mencatat laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi sejak 2011 hingga 2015 berturut-turut sebagai berikut: 7.86%, 7.03%, 6.84%, 7.35%, dan 4.21. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Jambi berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5.21% bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun tersebut merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera.

Disisi lain tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut kurang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Tren kemiskinan di Provinsi Jambi dari tahun 2008-2014 menurut data BPS persentasenya berturut-turut sebagai berikut: 9.28%, 8.55%, 8.4%, 7.9%, 8.28%, 8.41% dan 8.39%. Perbandingan antara tren pertumbuhan ekonomi dan tren kemiskinan di Provinsi Jambi dari Tahun 2008-2014 dalam bentuk grafik tergambar sebagai berikut :



Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tapi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja, padahal secara teoritis pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada *trickle down effect* yaitu rembesan kebawah menetes ke masyarakat miskin.

Beranjak dari beberapa hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk membuat suatu kajian tentang pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan dan kemiskinan di Provinsi Jambi?

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat merumuskan masalah yaitu: Bagaimana Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Disparitas pendapatan terhadap kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2011-2015?

3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Disparitas pendapatan terhadap kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2011-2015

4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- b. Bagi Pemerintah Provinsi Jambi, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan bagi perencanaan serta pengambilan kebijakan dalam upaya mewujudkan Visi Misi Jambi TUNTAS 2021 (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera) khususnya pada penuntasan kemiskinan.
- c. Bagi akademisi dan peneliti, dapat memberikan kontribusi pemikiran dan referensi keilmuan serta perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
- d. Bagi penulis secara pribadi dan masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang masalah ekonomi makro khususnya pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan, pengangguran dan kemiskinan.

5. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 97% tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dijelaskan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan. Kedua variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, namun secara parsial hanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan pengaruhnya terhadap kemiskinan. Sedangkan disparitas pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2. Pertumbuhan ekonomi walaupun memiliki hubungan yang negatif dengan jumlah tingkat kemiskinan dan pengaruhnya signifikan. Artinya pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan, namun disparitas pendapatan hubungannya positif dengan kemiskinan artinya disparitas tidak mempengaruhi penurunan kemiskinan secara signifikan.

6. Saran

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Oleh Karena itu, pemerintah Provinsi Jambi perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (merata) dan berkualitas, karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jambi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh masyarakat.
2. Pemerintah Provinsi Jambi perlu meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi terutama di daerah-daerah yang masih terisolir dan banyak penduduk miskin. Infrastruktur tersebut berupa jalan, jembatan dan pasar.

3. Pentingnya kebijakan pemerintah yang lebih fokus dalam meningkatkan investasi di sektor pertanian yang produktif dalam jangka panjang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga. Dengan demikian kedepan ketimpangan pendapatan dapat diturunkan dan memberikan pengaruh yang lebih signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan
4. Pemerintah Provinsi Jambi perlu mendukung dan membangun lembaga-lembaga pembiayaan mikro seperti koperasi unit desa, Baitul Mal Wat Tamwil dan sebagainya yang memberi manfaat pada penduduk miskin.

II. Efikasi Program Dana Desa Dalam Pembangunan Pedesaan Di Kab. Muaro Jambi (Peneliti : Joni Martin,SH)

1. Latar Belakang

Esensi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari dan untuk rakyat. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa esensi utama ari pemerintahan yangdemokratis akan berubah dalam beberapa waktu mendatang.

Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan demokrasi, maka dibentuklah pelayanan oleh pemerintah sampai tingkat desa yang selanjutnya, masing-masing desa

diberikan otonomi untuk mengurus dan melayani kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat istiadat yang berlaku diwilayahnya. Permasalahan kemudian timbul, adanya kewenangan untuk melayani, menimbulkan tuntutan agar tersedianya dana yang cukup. Wisakti (2008) mengutip pendapat Sadu Wasistiono (2006) yang menjelaskan bahwa:

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Karena hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “**autonomy**” indentik dengan “**auto money**”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pada tahun 2014 hadir Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, undang-undang ini merupakan “roh” hadirnya kesempatan besar bagi desa untuk menjalankan otonomi secara penuh. Karena Undang-undang ini bukan hanya mengatur mengenai kewenangan desa, namun juga memberikan tanggung jawab kepada desa untuk mengelola dana yang bersumber dari APBN yang selanjutnya disebut Dana Desa. Besaran dana ini mencapai 1 milyar perdesa, artinya ketika dana ini dimanfaatkan secara baik oleh desa maka bukan tidak mungkin penyebutan bagi desa miskin atau desa tertinggal tidak akan ada lagi. Bahkan lebih jauh, fenomena sosial kemiskinan di Indonesia yang sebagian besar berada diwilayah desa akan terselesaikan.

Namun, pemanfaatan dana 1 milyar 1 desa dilaksanakan secara bertahap, seperti yang dikelola oleh

desa-desa yang ada di Provinsi Jambi. Pada tahun 2015, alokasi dana desa yang sampai ke rekening provinsi jambi hanya mencapai Rp. **381.560.156.000,-** yang dialokasikan untuk 10 Kabupaten, 129 kecamatan dan 1395 desa. Perhatikan tabel berikut:

Alokasi Dana Desa di Provinsi Jambi

No	Kabupaten	Alokasi Dana		Jumlah Dana Desa	Realisasi
		Kecamatan	Desa		
1	Kerinci	16	285	74.743.267.000	74.3
2	Merangin	24	205	55.105.381.000	67.4
3	Muaro Jambi	11	150	41.034.901.000	100
4	Sarolangun	10	149	40.982.606.000	100
5	Bungo	17	141	38.514.584.000	69.2
6	Tanjung Jabung Barat	13	114	31.860.718.000	99.6
7	Batanghari	8	108	30.352.367.000	65.7
8	Tanjung Jabung Timur	10	73	21.043.597.000	100
9	Tebo	12	107	30.028.254.000	99.1
10	Sungai Penuh	8	65	17.894.481.000	65.5
Total		129	1397	381.560.156.000	

Sumber: BPMPD Provinsi Jambi

Dari tabel diatas, tergambar bahwa masing-masing kabupaten mendapatkan alokasi dana yang

berbeda, karena disesuaikan dengan jumlah desa. Dan jika diproporsikan masing-masing desa bisa mendapat alokasi 200-400 juta/ desa, namun realisasi pemanfaatan dana tidak sepenuhnya terserap, hanya beberapa kabupaten yang serapan anggarannya mencapai 100%. Sebagai salah satu contoh seperti yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Di kabupaten ini desa rata-rata mendapatkan alokasi 0,6-0,8% dari jumlah dana yang dialokasikan ke kabupaten Muaro Jambi dengan realisasi anggaran terbesar berada di kecamatan kumpeh ulu. Perhatikan tabel berikut:

Tabel Alokasi Pemanfaatan Dana Desa Tertinggi dan Terendah di Kabupaten Muaro Jambi

No	Kecamatan	Desa	Realisasi anggaran	Keterangan
1	Kumpeh Ulu	Kasang Puduk	335.266.903	Tertinggi
2	Sekernan	Nalo Tantan	331.734.891	Tertinggi
3	Sungai Gelam	Mekarjaya	320.689.937	Tertinggi
4	Bahar utara	Sungai dayo	258.719.455	Terendah
5	Sekernan	Tunas Mudo	258.177.376	Terendah
6	Bahar selatan	Mekar jaya	255.758.569	Terendah

Sumber: BPMPD Provinsi Jambi

Dari tabel tersebut tergambar bahwa beberapa desa dari 150 desa di Kabupaten Muaro Jambi

mendapatkan alokasi dana diatas 300 juta. Kemudian timbul pertanyaan besar, bagaimana pemanfaatan dana yang dialokasikan ke desa, karena dari beberapa hasil penelitian, pemanfaatan dana desa di sebagian desa di Indonesia belum optimal, salah satu faktornya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia. Bagaimana dengan Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Muaro Jambi apakah dana ini efektif dalam membangun pedesaan, serta perangkat desa telah mampu secara penuh mengelolanya. Karena jika dilihat dari persentase realisasi anggaran Kabupaten Muaro Jambi terserap penuh.

Dari beberapa permasalahan di atas, selanjutnya penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran secara umum mengenai kemampuan pemerintah desa dalam mengelola administrasi keuangan desa yang dilihat dari indikator usia, pendidikan dan pengalaman, serta lembaga pendu-kungnya seperti BPD dan Pendamping Desa, kemudian efektifitas pemanfaatan dana desa melalui indikator progres pemanfaatan dana dan progres pelaksanaan pembangunan.

2. Kesimpulan

Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Program Dana Desa Untuk Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Muaro Jambi, secara umum sudah baik, baik dari perencanaan dan pelaskanaan. Namun untuk pengawas-an yang melibatkan lembaga lain didesa yang masih belum optimal, termasuk transparansi anggaran antar perangkat desa.

Efektivitas Pemanfaatan Program Dana Desa Dalam Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Muaro Jambi ditinjau dari progres pengelolaan dan pemanfaatan sudah baik terlihat dari keberhasilan pemerintah desa memenuhi administrasi pertanggung jawaban, dari sisi program pembangunan desa hanya berdampak pada sisi SDM dan infrastruktur, sementara untuk pembangunan perekonomian desa sendiri belum bisa berdampak positif. Arah negatif ini didukung oleh masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, yang notabene berada di desa.

3. Saran

Dari penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak lagi membatasi pemanfaatan program dana desa pada infrastruktur, namun lebih konsen pada pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dan menganggur.
2. Pemerintah desa diharapkan lebih memperkuat dan melibatkan masyarakat secara optimal dalam membangun desa, sehingga masyarakat mengerti dan melihat perbedaan sebelum dan sesudah dana desa digulirkan.
3. Pemerintah Kabupaten, sebaiknya lebih intens memberikan pelatihan bukan hanya kepada perangkat desa namun juga kepada BPD dengan memprioritaskan anggota yang belum pernah mengikuti pelatihan agar tidak ada alasan anggota BPD tidak mengerti Tugas dan fungsinya.

4. Pemerintah Provinsi/Kabupaten bekerja sama dengan instansi terkait memberikan pelatihan mengenai pengawasan anggaran kepada BPD, hal ini diperlukan agar terjadi saling integrasi antar lembaga di desa dalam membangun desa sebagaimana dikehendaki oleh peraturan Perundang-undangan.

III. Model Kemitraan Budi Daya Ikan Air Tawar Di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Pada Desa Kumpeh Ulu) Peneliti Dr. Susi Desmaryani, MM)

1. Latar Belakang

Indonesia memiliki peluang pasar yang besar pada era globalisasi saat ini, memasuki pasar ASEAN memberi kesempatan bagi pelaku ekonomi untuk meningkatkan pendapatan. Daya saing adalah faktor utama yang harus diperhatikan. Setiap daerah memiliki potensi unggulan siap untuk dipasarkan, permasalahan yang sering ditemui adalah produk unggulan belum memiliki daya saing, sehingga belum bisa diterima dipasar internasional dan masih memenuhi kebutuhan pasar domestik bahkan pasar domestik mengalami kekurangan pasokan.

Dalam menghadapi persaingan, seperti yang dikemukakan oleh porter (2008) setiap perusahaan menghadapi lima kekuatan atau faktor persaingan seperti yang yaitu pesaing dalam industri yang sama, *bargaining power* pemasok, *bargaining power* pembeli, ancaman pendatang baru, dan ancaman dari produk substitusi. Sehingga salah satu kunci sukses agar dapat bersaing di pasar global adalah kemampuan untuk membina hubungan

kerjasama dalam menciptakan perbaikan terus menerus dalam proses dan produk, menjalin, dan membina hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan pemasok serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Semua hal ini akan mengarah pada peningkatan daya saing perusahaan (Siti Maisaroh, 2007)

Salah satu subsektor dari sektor pertanian yaitu perikanan, merupakan sub sektor yang memberi peluang bisnis yang menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan petani ikan. Namun untuk kondisi perikanan tangkap saat ini mengalami pertumbuhan yang lamban, hal ini dipengaruhi oleh faktor produksi dari ikan itu sendiri yang sudah mulai berkurang, sementara kebutuhan manusia akan ikan semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Budi daya ikan air tawar merupakan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan produksi ikan laut.

Pertumbuhan produksi ikan tawar secara nasional menurut kementerian perikanan dan kelautan mengalami peningkatan, seperti yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Produksi Ikan Air Tawar Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jumlah Produksi (ton)	Perkembangan
2010	1.246.909	-
2011	1.586.261	27,21%
2012	1.982.161	24,95%
2013	2.576.964	30,0%
2014	2.751.108	6,75 %

Sumber : Kementerian kelautan dan perikanan (2014)

Tabel diatas menggambarkan bahwa perkembangan jumlah produksi ikan air tawar semakin meningkat, meskipun pada akhir tahun 2014 persentase pertumbuhan menunjukkan angka yang lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 hanya sebesar 6,75 % dibanding pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 30 %.

Budidaya ikan air tawar adalah salah satu solusi untuk mengimbangi menurunnya produktivitas ikan laut yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sehingga kebutuhan konsumsi akan ikan dapat terpenuhi walaupun Indonesia mengalami penambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan.. Perkembangan budi daya ikan air tawar di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Produksi Ikan Air Tawar Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah Produksi (Ton)		Jumlah Produksi (Ton)	Perkembangan
	Ikan Kolam	Ikan Keramba		
2010	16.078,5	12.203,7	28. 282,2	-
2011	20.325,6	12.282,0	32.607,0	15,3%
2012	24.226,1	11.597,9	35.824	9,86 %
2013	32.290,4	11.778,7	44.069,1	23,02%
2014	31.452,7	199,5	31.652,2	-28,18%

Sumber : BPS 2015

Perkembangan total produksi ikan budi daya air tawar dari tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan perkembangan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan, dikhawatirkan produksi budidaya ikan air tawar jika terus mengalami penurunan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Selain itu pemasaran budidaya ikan air tawar saat ini masih bersifat tradisional, petani menjual ikan langsung melalui pengumpul ikan (pengepul). Kemudian pengepul inilah yang mendistribusikan kepada pedagang-pedagang ikan di pasar tradisional, rumah makan dan pedagang makanan. Harga ikan saat ini masih dirasakan mahal, baik yang ditangkap dilaut atau disungai maupun ikan yang dibudidaya. Mahalnya harga ikan disebabkan masih mahalnya pakan ikan.

Modal menjadi masalah dalam pengembangan budi daya ikan, bantuan pemerintah berupa kredit melalui koperasi dan pihak perbankan masih belum menyelesaikan solusi untuk pengembangan budi daya ikan air tawar. Selain modal, capaian kualitas hasil kerja juga mempengaruhi harga jual, ikan yang memiliki pertumbuhan terhambat akan mempengaruhi harga jual, ditambah dengan faktor besarnya jumlah persentase yang diperkirakan ikan hidup mulai dari pembenihan hingga panen. Marketing menjadi persoalan karena petani ikan memiliki akses pasar yang terbatas.

Penguatan daya saing petani ikan melalui kemitraan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani ikan salah satu solusi dan menjadi program pemerintah yang termaktub dalam UU No. 20 tahun 2008 yang menjabarkan

bahwa bersama pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan (Pasal 25 ayat 1). Kemitraan antara Usaha, Mikro , Kecil dan Menengah dan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar mencakup proses alih ketrampilan dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran dan permodalan, sumber daya manusia dan teknologi (pasal 25 ayat 2)

Dengan demikian bentuk kerjasama atau pola kemitraan yang terjadi adalah antara penyedia ikan dan yang membutuhkan ikan , Kerjasama dapat juga antara pengusaha pakan ikan dengan petani budidaya ikan dan kerjasama antara penyedia benih ikan dengan yang memerlukan benih. Kemitraan juga dapat terjadi antara penyedia pakan dan petani ikan.

Saat ini ada beberapa petani yang telah membuat pakan ikan sendiri, selain itu pakan ikan diperoleh oleh petani dari penjual pakan dari luar daerah, pemerintah Provinsi Jambi sudah membuat pabrik pakan di daerah kabupaten Muaro Jambi, pakan tersebut memiliki nilai jual yang lebih murah dari pada pakan yang bersumber dari luar daerah. Namun sumber bahan baku pakan masih diperoleh di daerah kabupaten lain, dalam hal ini Kabupaten Muaro Jambi belum mampu menyediakan bahan baku sendiri untuk membuat pakan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi untuk membangun pabrik pakan karena kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki bahan baku pembuat pakan.

Selain itu lembaga pembiayaan berupa lembaga perbankan dan non perbankan juga membentuk kemitraan antara UMKM dengan lembaga tersebut, dimana pemerintah berperan dalam memfasilitasi akses UMKM untuk mendapatkan modal.

Dengan demikian peran pemerintah dalam pola kemitraan lebih dipertegas sebagai koordinasi, fasilitasi dan pengawasan bagi kemitraan usaha nasional. Hal ini di pertegas dengan UU no. 20 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa Menteri koperasi dan UMKM dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah untuk memantau pelaksanaan kemitraan (Pasal 34). Melarang usaha besar memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/ atau usaha menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan (pasal 35). Peran pemerintah dipertegas oleh pendapat Dipta (2008) yang mengatakan Peranan pemerintah dan instansi-instansi pendukung lainnya adalah strategis dan penting. Peranan pemerintah dapat dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk menciptakan kemitraan dan dapat pula memberikan fasilitas dan dukungan-dukungan lain seperti misalnya fasilitas penciptaan keserasian (match making), menyediakan bantuan keuangan dan keperluan-keperluan yang lainnya untuk menjembatani kemitraan antara kedua pihak tersebut

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1977 tentang Kemitraan. Dengan berpegang pada prinsip saling

membutuhkan dan saling menguntungkan, kemitraan dapat memberi solusi dari ketimpangan - ketimpangan sosial seperti tidak meratanya kesempatan berusaha dan ketimpangan pendapatan (Tira, 2012).

Gambaran sementara kemitraan yang terjadi pada budidaya ikan air tawar di Muaro Jambi belum melakukan kemitraan penuh, rata-rata petani belum membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemasok yaitu pemilik pakan ikan, benih dan petani ikan, dan antara petani ikan dengan penampung ikan (yang membeli ikan). Hal ini berdampak pada kesulitan marketing dan kesulitan mendapatkan benih dan pakan ikan. Begitu juga kemitraan antara pemerintah melalui lembaga pembiayaan dalam hal ini perbankan dan non perbankan juga belum melakukan kemitraan penuh. Kemitraan yang terjadi saat ini hanya sebatas pemberian modal pinjaman namun tidak ikut membesarkan atau menumbuhkan kembangkan usaha melalui pembinaan sampai marketing.

Kemampuan mengakses teknologi untuk mengenal pangsa pasar lebih luas, belum maksimal dilakukan oleh petani ikan, hal ini ditemukan masih banyak petani ikan yang belum menggunakan akses teknologi untuk kegiatan pemasaran. Infrastruktur teknologi belum masuk sampai kedesa-desa, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengakses informasi melalui dunia internet.

Peran pemerintah dalam membangun kemampuan petani ikan melalui berbagai program yang ada belum mampu membuat petani ikan air tawar yang ada di Provinsi Jambi memiliki kemampuan dan ketrampilan yang dapat diandalkan untuk bersaing baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, keterbatasan kemampuan mencari pasar baru

dikarenakan minimnya untuk mendapatkan informasi dan kemampuan untuk menciptakan jaringan yang luas terkait dengan kegiatan pemasaran belum maksimal dilakukan oleh petani ikan. Berdasarkan hasil survey sementara ada permintaan pasar yang besar, namun memiliki kendala di kuantitas karena tidak bisa memenuhi kebutuhan permintaan. Hasil penelusuran ditemui belum adanya integrasi dan koordinasi antara petani ikan dalam satu kota/ kabupaten untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebenarnya jika integrasi terjadi dan di fasilitasi oleh pemerintah, kebutuhan akan permintaan ikan dapat terpenuhi, namun karna kurangnya integrasi antara petani , maka permintaan pasar tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi maka penulis akan melakukan kajian bagaimana model kemitraan budi daya ikan air tawar di Kabupaten Muaro Jambi

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pola kemitraan dan kondisi eksisting budi daya ikan air tawar Di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Model strategi memperkuat daya saing budidaya ikan air tawar melalui pola kemitraan di Kabupaten Muaro Jambi.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan pola kemitraan budi daya ikan air tawar di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Mengetahui Model strategi penguatan daya saing budi daya ikan air tawar melalui pola kemitraan di Kabupaten Muaro Jambi.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk perbaikan program pada dinas perikanan dan kelautan di Kabupaten Muaro Jambi melalui program kemitraan usaha meningkatkan daya saing petani ikan air tawar.

5. Simpulan

1. a. Pola Kemitraan pada pembudidaya ikan air tawar di Kecamatan Kumpoh Ulu Kabupaten Muaro Jambi belum berjalan secara maksimal, hanya sekitar 22 % sudah mengarah pada pola kemitraan dagang umum, (pola dagang umum yang berlangsung sekarang belum maksimal mendukung kebutuhan petani dalam bentuk sarana dan prasarana), 78 % belum mengarah pada pola kemitraan.
- b. Pembudidaya yang belum mengarah pada pola kemitraan memiliki permasalahan diantaranya, masalah modal, masalah pakan, masalah penyakit ikan, masalah bahan baku dan masalah pasar.
2. a. Pola Kemitraan Inti Plasma adalah model kemitraan yang mampu meningkatkan kinerja pembudidaya ikan air tawar, melibatkan koperasi

sebagai mitra inti dan pembudidaya ikan air tawar sebagai yang bermitra (sebagai plasma).

- b. Koperasi melakukan kemitraan dengan perusahaan besar, pedagang, BUMN guna mendukung dan meningkatkan kinerja pembudidaya ikan air tawar

6. Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja pembudidaya ikan air tawar (pembudidaya ikan patin), pemerintah Kabupaten Muaro Jambi membangun pola kemitraan yang mengarah pada jenis kemitraan inti plasma , yang melibatkan koperasi sebagai mitra inti, pembudidaya ikan air tawar sebagai yang bermitra (sebagai plasma) .
2. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, melalui Dinas Koperasi dan UMKM membentuk koperasi yang melindungi dan menaungi kebutuhan pembudidaya ikan air tawar dalam meningkatkan kinerja pemasarannya.
3. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi lebih intensif menjalankan fungsinya sebagai koordinator, fasilitator dan pengawas terhadap keberhasilan pola kemitraan model inti plasma yang diusulkan untuk memecahkan permasalahan pembudidaya ikan air tawar

IV Kajian Pemasaran Dan Daya Saing Pinang Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Peneliti Ir. Mukhlis, M.Si)

1. Latar Belakang

Tanaman pinang dengan nama latin *Arecacatechu L* termasuk salah satu komoditas perkebunan Indonesia yang di ekspor keluar negeri terutama ke negara-negara Asia Selatan (India, Pakistan dan Nepal). Secara nasional nilai ekspor pinang belum diketahui seberapa besar kontribusinya terhadap terhadap devisa negara. Kebijakan pemerintah belum banyak menyentuh untuk pengembangan usahatani pinang tersebut baik secara nasional maupun Provinsi Jambi. Namun bagi Provinsi Jambi, pinang merupakan salah satu komoditas ekspor andalan pada sektor pertanian.

Nilai ekspor komoditas pinang Provinsi Jambi pada Tahun 2014 yaitu US \$ 42.920.452,91 dan menduduki posisi kedua setelah karet yaitu US \$ 42.920.452,91 kemudian menyusul kelapa sawit dalam bentuk *Crude Oil Palm* (CPO) US \$.26.126.972,26 (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jambi 2015)

Perkembangan volume dan nilai ekspor pinang Provinsi Jambi tahun 2010 s/d 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. Volume dan Ekspor Pinang Provinsi Jambi Tahun 2010 s/d 2014

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai (US \$)	Harga Rata-Rata US \$/Ton
2010	70.435.75	36.854.811,00	523,24
2011	57.835.81	54.334.386,93	939,46
2012	39.667.33	27.782.352,55	700,38
2013	36.413,54	26.914.005,89	739,12
2014	38.496,89	42.920.452,91	1.114,90

Staistik Perkebunan Tahun 2015

Volume ekspor pinang di Provinsi Jambi dari tahun 2010 s/d 2013 mengalami penurunan namun mengalami kenaikan pada tahun 2014. Kalau dilihat dari nilai ekspor dan rata-rata harga US \$/ton menunjukkan tidak stabilnya harga ekspor.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu sentra produksi pinang di Provinsi Jambi. Perkembangan luas lahan, produksi, produktivitas dan jumlah petani pinang selama lima tahun terakhir tahun 2010 s/d 2014 di kabupaten tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Luas lahan, Produksi dan Produktivitas Pinang Tahun 2010 s/d 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tahun	Potensi Pinang			
	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg)	Jumlah Petani (orang)
2010	8.404	9.855	1.602	6.412
2011	8.056	10.028	1.592	6.501
2012	8.615	9.766	1.548	6.559
2013	8.714	9.843	1.528	6.718
2014	8.902	2.559	385	6.929

Data Statistik Perkebunan Provinsi Jambi 2015

Data di atas menggambarkan bahwa selama lima tahun terakhir (2010 s/d 2014) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan jumlah petani dan luas areal tanaman namun mengalami penurunan dari sisi produktivitas. Penurunan produksi dan produktivitas yang sangat signifikan dari tahun 2013 ke 2014 masing-masing produksi 384,64%, dan produktivitas hasil turun sebesar 396,88%.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peluang untuk dapat meningkatkan pendapatan petani pinang melalui penggunaan varietas pinang unggul lokal Betara. Hasil identifikasi dan evaluasi Blok Penghasil Tinggi (BPT) yang dilakukan di Betara Kabupaten Tanjung Barat dapat menghasilkan kernel kering 7,81 ton/Ha dengan rata-

rata produksi kernel kering sebanyak 5,70 kg/pohon/tahun (Hasil Survei Dinas Perkebunan Tahun 2011). Beberapa perusahaan yang menjadi eksportir pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain diantaranya PT Bintang Selamanya, PT Budiman Sukses, PT Bandar Jakarta, dan CV Mantera. Dalam setahun, dari Dermaga Kuala Tungkal mampu mengirim pinang hingga 350 ton pinang kering, sementara Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya mampu menyuplai 150 ton, untuk memenuhi kuota tersebut di suplai dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Riau.

Permasalahan umum yang mempengaruhi rendahnya nilai jual pinang yang diterima petani diduga karena rendahnya kualitas buah pinang olahan dan panjangnya rantai pemasaran sampai ke eksportir, sehingga mempengaruhi daya saing secara finansial dan ekonomi pinang. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut timbul pertanyaan bagaimana pemasaran dan daya saing pinang pada lokasi penelitian.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana gambaran usahatani pinang ?
- b. Bagaimana rantai dan margin pemasaran pinang ?
- c. Bagaimana daya saing komoditas pinang di tingkat petani?

3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui gambaran usahatani pinang

- b. Mengetahui margin pemasaran pinang
- c. Mengetahui daya saing komoditas ditingkat pinang ditingkat petani.

4. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai referensi bagi petani untuk mengembangkan usaha tani pinang.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengembangan usaha tani pinang yang berdaya saing
- c. Sebagai referensi atau informasi bagi peneliti selanjutnya.

5. Kesimpulan

- 1. Rantai pemasaran buah pinang belah dan bulat di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori pendek dalam bentuk dua pola
 - a. Petani → Pedagang Pengumpul Kecil → Pedagang Pengumpul Besar → Pdg Besar/Eksportir
 - b. Petani → Pedagang Pengumpul Besar → Pedagang Besar/Eksportir
- 2. Margin biaya dan keuntungan yang diterima pedagang pengumpul relatif kecil, masing-masing Rp 500/kg sehingga bahagian yang diterima petani cukup besar.

3. Komoditas pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki keunggulan komparatif dengan nilai DRCR 0,79 dan keunggulan kompetitif dengan PCR 0,79

6. Rekomendasi Kebijakan

1. Dalam rangka menciptakan stabilitas harga jual produk pinang pada skala usaha menguntungkan dan meningkatkan daya saing produk, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten sebagai sentra produksi pinang.
 - a. Menerapkan kebijakan secara umum untuk tidak mengeksport produk hasil perkebunan dalam bentuk bahan mentah.
 - b. Mendorong para eksportir untuk melakukan negosiasi dengan importir negara tujuan agar dapat menerima minimal produk bahan setengah jadi (tepung pinang) sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan .
 - c. Mendorong para pengusaha untuk dapat berinvestasi dalam bidang pengolahan buah pinang setengah jadi dalam bentuk produk olahan tepung pinang atau bentuk lain yang dapat memberikan nilai tambah.
 - d. Dinas perkebunan dengan Instansi terkait secara terkoordinasi merencanakan kegiatan yang dapat mendukung pengembangan komoditas pinang yang berdaya saing dan

membangun sistem pendataan mulai data potensi sampai kepada data kebutuhan ekspor seperti harga *Free and Board* (FOB).

2. Memberikan dukungan permodalan bagi petani dan pedagang dalam rangka pengembangan komoditas pinang sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku.

V. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas Dan Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Tebo (Peneliti M. Rialdi Syaputra, SE)

1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional di daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, pajak mempunyai peran yang sangat penting, karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Subyek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata : 1) mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau, 2) memperoleh manfaat atas bumi, dan atau 3) memiliki bangunan, dan atau, 4) memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang menggantikan berbagai jenis pajak yang berlaku sebelumnya yakni pajak kekayaan, lpeda, pajak rumah tangga, pajak jalan dan sebagainya. Roy Kelly mengungkapkan bahwa pajak ini mempunyai peran penting bahkan diharapkan dapat menempati kedudukannya sebagai sumber penerimaan potensial masa depan, khususnya dalam rangka untuk membiayai dan menggalakan pembangunan ekonomi daerah (Devas, 1989).

Menurut Suharno (2003), untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas di dalam penjelasan sebagai berikut:

- 1) Sektor Pedesaaan adalah objek PBB dalam satu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain.

- 2) Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, *real estate*, komplek pertokoan, industri, perdagangan dan jasa.
- 3) Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta.
- 4) Sektor Kehutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti kayu tebangan, rotan, damar, dan lain-lain.
- 5) Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang seperti emas, batubara, minyak, dan gas bumi dan lain-lain.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Namun usaha dan upaya guna meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih mengalami banyak hambatan, hal ini dikarenakan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah terutama dikarenakan obyek pajak yang berpindah tangan dan wajib pajak yang memiliki obyek pajak berada tinggal diluar kota. Kemudian kurang/tidak validitas data yang terjadi dikarenakan oleh *Human Error*, sehingga sejumlah wajib pajak tidak mau membayar kewajiban perpajakannya, sehingga menimbulkan terjadinya tunggakan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Realisasi penerimaan PBB yang masih jauh dari target di Kabupaten Tebo dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar PBB, Hal ini diduga karena kurang memuaskannya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yang masih minim dan kurangnya

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Apollo (2005) dalam Wulandari (2007) kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor seperti pendidikan dan pengetahuan perpajakan, sistem perpajakan, penyuluhan dan informasi perpajakan, letak geografis, kinerja aparatur pajak, penegakan hukum serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada WP.

Penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan cara agar ketentuan hukum perpajakan itu ditaati oleh wajib pajak. Dengan adanya konsistensi dapat diharapkan bahwa kepatuhan wajib pajak muncul bukan karena aspek paksaan dan ancaman, melainkan kesadaran (Harahap, 2004 dalam Kusumawati, 2006). Sedangkan dengan adanya landasan hukum yang pasti akan memudahkan fiskus dalam bertindak atau mengambil keputusan.

Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tebo. Dalam penelitian ini akan diambil empat kecamatan sebagai lokasi penelitian. Kecamatan-Kecamatan ini diambil berdasarkan realisasi pemungutan terkecil. Kecamatan-Kecamatan tersebut ialah Tebo Ilir, Rimbo Bujang, Tengah Ilir dan Tebo Tengah.

2. Rumusan Masalah

Rumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tebo?
2. Bagaimanakah efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tebo setelah ditetapkan sebagai pajak daerah ?
3. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tebo ?

3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tebo.

2. Mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tebo setelah ditetapkan sebagai pajak daerah ?
3. Mengetahui Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tebo ?

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya Keuangan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Kabupaten Tebo dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tebo.

5. Simpulan

1. Variabel pelayanan pajak, pengetahuan PBB dan penegakan hukum pajak masing-masing berpengaruh signifikan sebesar 77,6 %, sedangkan 22,3 % dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang tidak terungkap dalam penelitian ini.

2. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 Kabupaten Tebo sebesar 57,91% dengan kriteria nilai interpretasi tidak efektif.
3. Pemerintah Kabupaten Tebo berupaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, yaitu dengan menerapkan strategi SO (*Strength and Opportunities*), antara lain: a). Melaksanakan pendataan, perekaman dan pemetaan obyek PBB P2 dan pemutakhiran data secara periodik dan didukung basis data yang baik. b). Mengurangi beban kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2 bagi wajib pajak melalui penghapusan piutang PBB P2 yang sudah kadaluarsa dan pengurangan pokok pajak serta c). membangun kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemungutan PBB P2.

6. Rekomendasi Kebijakan

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pajak

Aparat harus mampu mengestimasi potensi yang sah, mendata basis pajak dan wajib pajak, mampu melakukan pemutakhiran data secara periodik. Pengelolaan PBB P2 adalah jenis pajak yang membutuhkan keahlian khusus yang meliputi keahlian di bidang administrasi pertanahan dan penilaian tanah dan/atau bangunan serta administrasi perpajakan. Karena jumlah objek dan wajib pajak PBB P2 yang banyak pengelolaan PBB P2 juga membutuhkan keahlian teknologi informasi untuk mengelola basis pajak. BPTHB merupakan pajak yang dikenakan pada pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan. BPHTB memerlukan keahlian aparat dalam penilaian bumi dan/atau bangunan.

2. Peningkatan Pelayanan Prima

Pelayanan prima memberikan kepastian waktu layanan, kenyamanan, dan keamanan wajib pajak. Pelayanan prima memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kemudahan membayar pajak akan mengurangi biaya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dan tingkat layanan publik yang diberikan. Semakin bagus kinerja dan tingkat layanan publik semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pemutakhiran dan Estimasi Potensi PBB P2

Pemutakhiran pajak harus dilakukan secara periodik dan didukung oleh manajemen basis data yang baik. Pemutakhiran pajak diharapkan mampu menangkap semua perubahan objek dan subjek pajak.

Pemutakhiran data secara aktif dilakukan dengan usaha dari pemungut pajak untuk menyesuaikan data pajak lama dengan data pajak baru melalui kegiatan langsung ke lapangan (verifikasi/pendataan ulang). Kegiatan ini diupayakan dilakukan secara berkala yaitu tiga tahun sekali atau lebih untuk daerah yang perkembangannya kurang

cepat atau satu tahun sekali untuk daerah yang mengalami perkembangan yang pesat yang disesuaikan dengan kebijakan dan alokasi anggaran dan biaya yang ada.

Pemutakhiran data aktif dapat dilakukan penilaian secara masal dan penilaian secara individual. Pemutakhiran dengan penilaian masal dilakukan dengan memutakhirkan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (BDKB). Hasil pemutakhiran ZNT dan DBKB dengan bantuan penilaian yang terintegrasi dalam sistem manajemen, *Computer Assisted Valuation (CAV)*, akan menghasilkan Indikasi Nilai Pasar (INP) pada semua objek PBB P2, yang menjadi penentuan dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Salah satu penyebab rendahnya PAD di banyak daerah adalah “ketidakmampuan” daerah mengestimasi secara sah potensi pajaknya. Potensi pajak cenderung ditentukan secara incremental. Penentuan potensi pajak dapat dilakukan dengan pendekatan makro dan mikro, atau gabungan antara keduanya. Semua pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan.

VI. Pengembangan Cerita Rakyat Jambi Sebagai Bahan Ajar Muatan Lokal Bagi Sekolah Dasar (Peneliti Septu Haswindy, S.Si, M.Si)

1. Latar Belakang

Pada saat ini kita sudah berada pada era globalisasi dimana tidak ada lagi batasan antar negara.

Perkembangan dibidang teknologi, informasi serta komunikasi juga berkontribusi dalam memutus jarak antar daerah, wilayah bahkan antar negara. Televisi dan internet merupakan beberapa contoh produk perkembangan pada bidang teknologi informasi yang berfungsi memberikan akses terhadap informasi dari berbagai penjuru dunia.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan arus globalisasi semakin menyebar ke segenap penjuru dunia. Penyebaran yang berlangsung secara cepat dan meluas, tak terbatas pada negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi juga melintasi batas negara-negara berkembang dan miskin dengan pertumbuhan ekonomi rendah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan derasnya arus globalisasi merupakan dua proses yang saling terkait satu sama lain. Tak ada globalisasi tanpa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam konteks ini, globalisasi menjadi sebuah fenomena yang tak terelakkan (Scholte 2001). Globalisasi yang diusung oleh negara-negara maju memiliki budaya berbeda dengan negara-negara berkembang. Nilai-nilai tersebut bisa menjadi ancaman bagi kelestarian nilai-nilai lokal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, merasuknya nilai-nilai Barat yang menumpang arus globalisasi ke kalangan masyarakat Indonesia merupakan ancaman bagi budaya asli yang mencitrakan lokalitas khas daerah-daerah di negeri ini.

Kesenian-kesenian daerah seperti ludruk, ketoprak, wayang, gamelan, dan tari menghadapi ancaman serius dari berkembangnya budaya pop khas Barat yang semakin diminati masyarakat karena dianggap lebih modern.

Budaya konvensional yang menempatkan toleransi, keramah tamahan, penghormatan pada yang lebih tua juga sudah mulai tergerus oleh pergaulan bebas dan sikap individualistik yang dibawa oleh arus globalisasi. Dalam situasi demikian, kesalahan dalam merespon globalisasi bisa berakibat pada lenyapnya budaya lokal.

Pada era globalisasi sekarang ini masalah yang penting mendapat perhatian adalah identitas kebangsaan dan kedaerahan. Derasnya arus globalisasi menyebabkan terkikisnya nilai-nilai kebangsaan. Anak-anak lebih bangga dengan budaya asing daripada budaya bangsanya sendiri.

Karena itu, jati diri bangsa sebagai nilai identitas masyarakat harus dibangun secara kokoh dandiinternalisasikan secara mendalam. Caranya adalah dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dinikepada generasi muda. Pendidikan memegang peran penting di sini sehingga pengajaran budaya perludimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional dan diajarkan sejak sekolah dasar.

Permendiknas No. 22 Tahun 2006tentang Standar Isi menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP) selain memuat beberapa mata pelajaran pokok, juga terdapat mata pelajaran (mapel) muatan lokal (mulok) yang wajib diberikan pada semua tingkat satuan pendidikan. Mapel mulok harus memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat, dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan (Depdiknas,2004,2006,2007).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, muatan lokal merupakan kegiatan kulikuler untuk mengembangkan

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang materinyatidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal sebagai program pendidikan dimana isi dan media penyampaian nya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan (Musanna 2009).

Muatan lokal ditujukan untuk menjembatani antara kebutuhan keluarga dan masyarakat serta disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Muatan lokal juga dapat memberikan wawasan di sekitar peserta didik dan memberikan peluang untuk mengembangkan kemampuan dirinya yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.

Konten budaya lokal memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Hal ini ditempuh melalui kegiatan penyebaran dan peningkatan pengetahuan siswa tentang konten dan budaya lokal pada konteks lokal pula (Cheng, 2003: 33).

Konten budaya lokal dikatakan terintegrasi apabila ada pencampuran, penghubungan, dan penginternalisasian nilai, norma, tradisi, dan konten budaya lokal lainnya dalam pembelajaran, dalam hal ini adalah buku tematik. Hal itu sejalan dengan pendapat Cheng (2002:33) bahwa integrasi konten budaya lokal dilakukan dengan cara memasukkan norma eksplisit, nilai-nilai kearifan lokal yang penting, harapan masyarakat budaya lokal, dan juga memaparkan konsep pentingnya persatuan antarsub kultur yang ada di suatu negara.

Penerapan Mulok pada sekolah dasar khususnya Kota Jambi masih belum tertata rapi. Kurikulum mulok yang telah disusun oleh tim penyusun kurikulum muatan lokal budaya daerah kota Jambi secara garis besar telah memberikan panduan bagi guru-guru pengajar mata pelajaran mulok. Akan tetapi tidak adanya buku pegangan atau buku materi muatan lokal yang menjadi patokan bagi guru membuat penerapan mulok menjadi beragam. Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini berupaya untuk mengembangkan sebuah bahan ajar muatan lokal yang berisikan cerita rakyat Jambi yang ditujukan untuk siswa kelas bawah (kelas dua) sekolah dasar.

2. Rumusan masalah

- a. Bagaimana karakteristik pengembangan cerita rakyat jambi menjadi bahan ajar muatan lokal bagi sekolah dasar?
- b. Bagaimana prinsip pengembangan cerita rakyat jambi menjadi bahan ajar muatan lokal bagi sekolah dasar?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan karakteristik bahan ajar muatan lokal berdasarkan cerita rakyat Jambi.
- b. Untuk mendeskripsikan karakteristik bahan ajar muatan lokal berdasarkan cerita rakyat Jambi.

4. Karakteristik Bahan Ajar Muatan Lokal Cerita Rakyat Jambi

Mengembangkan bahan ajar muatan lokal cerita rakyat jambi, perlu dilakukan upaya pengembangan melalui sebuah penelitian ilmiah sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan seperti yang diharapkan.

Karakteristik bahan ajar muatan lokal cerita rakyat jambi dalam penelitian ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Konsep narasi cerita rakyat yang diberi ilustrasi gambar dari alur cerita bersifat ganda yaitu mengenalkan budaya lokal di kehidupan sehari-hari dan mengajarkan anak tentang kosakata ataupun pepatah dalam bahasa lokal.
- b. Sifat dari bahan ajar muatan lokal cerita rakyat jambi memiliki visual (gambar) yang dijelaskan dalam narasi sederhana dan dapat dipahami oleh anak-anak serta dibantu oleh gambar ilustrasi sebagai pelengkap teks.

5. Prinsip Bahan Ajar Muatan Lokal Cerita Rakyat Jambi

Adapun prinsip bahan ajar muatan lokal cerita rakyat jambi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penggunaan media cerita bergambar anak dilakukan untuk memberikan pengenalan benda, kata sifat atau kata kerja, waktu dan peristiwa yang sedang berlangsung dalam cerita sehingga pembelajaran bersifat incidental,

- b. Perlu apersepsi dalam mengenalkan cerita budaya lokal yang disesuaikan dengan kemampuan guru, oleh sebab itu guru harus mempersiapkan rencana pembelajaran terlebih dahulu,
- c. Dalam pembelajaran penerapan gambar di awal untuk memancing anak berkonsentrasi secara terarah,
- d. Metode pembelajaran yang digunakan adalah mendongeng, berdiskusi, dan penggunaan alat peraga,
- e. Guru sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran

6. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan Pengembangan Cerita Rakyat Jambi Menjadi Bahan Ajar Muatan Lokal Bagi Sekolah Dasar diketahui bahwa guru muatan lokal Sekolah Dasar membutuhkan buku pegangan untuk muatan lokal. media pembelajaran berupa cerita bergambar yang disertakan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sebagai bahan ajar dan pedoman serta panduan dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar muatan lokal.

7. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan lapangan dalam kegiatan Pengembangan Cerita Rakyat Jambi Menjadi Bahan Ajar Muatan Lokal Bagi Sekolah Dasar didapatkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Jambi perlu membuat buku muatan lokal bagi sekolah dasar terutama untuk kelas satu, dua dan tiga.

VII. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Peneliti Weni Lestari, SP)

1. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pembangunan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah ketersediaan lahan pertanian pangan. Lahan Pertanian pangan memiliki fungsi strategis secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia yang agraris. Namun karena kebutuhan terhadap lahan-lahan baru serta luas lahan yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk, maka alih fungsi lahan tidak dapat dihindari.

Adanya permasalahan alih fungsi lahan pertanian di Indonesia tentu saja dapat mengurangi lahan pertanian, terutama lahan sawah telah berlangsung sejak dasawarsa 90-an. Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 mengungkapkan data konversi sawah menjadi lahan non pertanian dari tahun 1999-2002 mencapai 563.159 Ha atau 187.719,7 Ha/tahun. Antara tahun 1981-1999, neraca pertambahan lahan sawah seluas 1,6 juta Ha, namun antara tahun 1999-2002, terjadi pengurangan luas lahan seluas 0,4 juta Ha atau 141.285 Ha/tahun.

Masalah lahan semakin kompleks dengan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian dengan laju sekitar ± 110.000 ha/tahun (Data BPS tahun 1998-2002). Hasil audit Kementerian Pertanian 2012 menunjukkan, total luas sawah nasional hanya mencapai 8,1 juta hektare. Kementerian Pertanian pun cuma bisa

mencetak sawah baru seluas 330 ribu hektare selama 2006-2013 atau seluas 40 ribu hektare setiap tahunnya. Kemampuan cetak sawah oleh pemerintah belum bisa menyamai laju konversi lahan sawah selama periode tersebut, seluas 100 ribu hektare per tahun.

Belum lagi potensi alih fungsi lahan sawah akibat dari penerapan RTRW oleh Pemda kabupaten/kota yang kurang berpihak kepada pertanian. Cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan antara lain a)menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, b) hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran, dan c) hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi. Alih fungsi lahan jika tidak diantisipasi akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

Keadaan alih fungsi lahan ini mengkhawatirkan pemerintah dan pemerintah daerah karena akan kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kedaulatan pangan dan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan ke non pertanian terus meningkat. Permasalahan ini menuntut negara dan pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi lahan pertanian pangan secara terus menerus telah dibentuk ketentuan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan bahwa Provinsi Kabupaten/Kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang salah satunya adalah kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan.

Di Provinsi Jambi juga terjadi penyusutan lahan pertanian pangan dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Data BPS Provinsi Jambi (2014) pada periode tahun 1999-2013 menunjukkan adanya trend penyusutan luas areal lahan pertanian tanaman pangan di hampir semua kabupaten di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan oleh berlangsungnya alih fungsi lahan-lahan pertanian ke berbagai penggunaan lain baik yang masih berada dalam lingkup sektor pertanian seperti menjadi areal perkebunan dan tanaman buah-buahan yang secara ekonomi lebih menguntungkan, maupun ke penggunaan pada sektor-sektor lain seperti menjadi areal perindustrian, fasilitas umum, dan pemukiman penduduk (Matondang *et al.* 1992 dalam Minsyah dkk 2010).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada awal tahun 2000-an produksi padi berlimpah yang berhasil menempatkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penghasil beras utama di Provinsi Jambi. Bahkan sekitar 25 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah ini berasal dari sektor pertanian. Pada saat itu, produksi padi menghasilkan 136.800 ton gabah kering giling atau setara dengan 88.923 ton beras dari lahan seluas 47.174 hektar.

Namun kegemilangan sektor pertanian tersebut jauh menurun di tahun 2010-2011. Tahun 2010 hasil produksi padi hanya mencapai 113.956 ton. Hasil tersebut terus berkurang di tahun 2011 yang hanya menghasilkan 108.319 ton. Penyusutan ini sejalan dengan terus menyempitnya luas areal sawah. Saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya memiliki areal sawah produktif seluas 31.005 hektar.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap pertanian produktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timurtelah ditopang oleh suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Secara umum, Perda ini mengatur tentang ketentuan yang mengikat antara pemerintah dan petani pemilik lahan dan petani penggarap dalam pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perda No. 18 Tahun 2013 telah disahkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan mulai berlaku pada bulan Juni 2014.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten pertama dan satu-satunya di Provinsi Jambi yang telah menetapkan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)seluas paling kurang 17.000 Ha dan lahan cadangan pangan seluas paling kurang 4.000 Ha.Ini merupakan wujud dari keseriusan Pemerintahan

kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan paparan tersebut perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat terwujud. Oleh karena itu, penting dilakukan suatu kajian “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.”.

2. Rumusan Masalah

Salah satu program pemerintah di sektor pertanian adalah program perlindungan lahan pangan berkelanjutan sebagai kawasan strategis nasional, program ini adalah bentuk upaya pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang telah dituangkan dalam UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, berikut turunannya PP No 1 Tahun 2011. Satu-satunya kabupaten di Provinsi Jambi yang telah memiliki kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa Peraturan Daerah (Perda) No. 18 Tahun 2013. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut berarti Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupaya dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap pertanian produktif.

Untuk itu maka rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran perkembangan luas lahan pertanian tanaman pangan di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana gambaran konversi lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3. Bagaimana pelaksanaan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran perkembangan luas lahan pertanian tanaman pangan di Provinsi Jambi
2. Untuk mengetahui gambaran konversi lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang nantinya dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai rekomendasi dan dasar pertimbangan pelaksanaan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan diterapkan oleh kepala daerah dan instansi terkait dalam mengendalikan alih fungsi lahan dan sekaligus dijadikan percontohan bagi kabupaten/kota lainnya untuk membuat kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dalam membatasi terjadinya alih fungsi lahan.

5. Kesimpulan

1. Kawasan pertanian di Provinsi Jambi sebesar 83% dari total lahan yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Luas lahan pertanian tanaman pangan di Provinsi Jambi berkurang seluas 25,28% selama periode 1999-2013 dengan laju pertumbuhan -2,06 pertahun. Areal pertanaman yang paling banyak berkurang adalah areal pertanaman kedelai (86,98%) disusul areal pertanaman jagung (67,38%) dan areal pertanaman padi (14,05%).
2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2005-2015 kehilangan lebih dari 5.000 hektar lahan pertanian dengan rata-rata setiap tahunnya kehilangan 4 persen lahan. Petani mengkonversikan lahan pertanian pangannya untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Luas lahan padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2000-2013 mengalami penyusutan drastis yaitu 38,65%.
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat, karena sudah ada peraturan daerah yang mengatur lahan pertanian berkelanjutan, hanya saja belum dituangkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan lainnya seperti peraturan desa. Ditinjau dari aspek perencanaan dan penetapan LP2B belum berjalan sebagaimana mestinya karena aspek perencanaan dan penetapan masih berada pada koridor yang tidak tepat karena kabupaten

Tanjung Jabung Timur menempatkan LP2B di dalam RTRW, Seharusnya LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan ditempatkan di dalam RDTR.

6. Saran

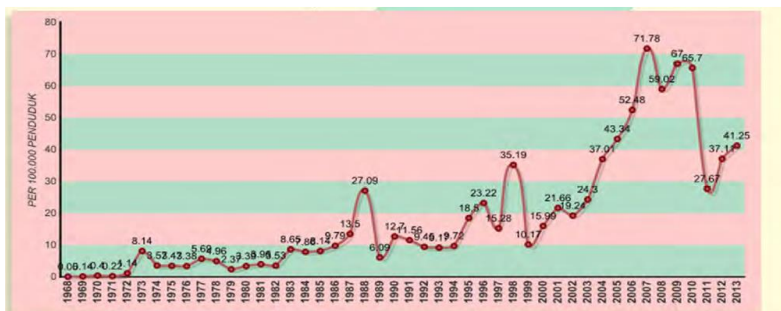
1. Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk segera Membuat dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang supaya pelaksanaan LP2B lebih jelas dan rinci dan dapat dijalankan.
2. Bagi kecamatan dan desa yang belum menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk segera menetapkan peraturan desa agar tidak ada lagi yang melakukan konversi lahan
3. Sosialisasi secara bertahap di setiap desa mengingat semakin maraknya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
4. Memberikan reward/insentif untuk petani agar termotivasi untuk menjadikan lahannya masuk kedalam LP2B
5. Memotivasi pemerintah agar berkomitmen untuk menjalankan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

VIII Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Jambi (Novia Susianti, Skm, Bio.Med)

1. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) memperkirakan insiden Demam Dengue telah meningkat dengan faktor (*by a factor of*) 30 selama 50 tahun terakhir. Insiden Demam Dengue terjadi baik di daerah tropik maupun sub tropik wilayah urban, menyerang lebih dari 100 juta penduduk tiap tahun, termasuk 500.000 kasus DBD dan sekitar 30.000 kematian terutama anak-anak. Penyakit ini endemik di 100 negara termasuk Asia (WHO, 1999). Dengan pemanasan global (*Global Warming*) dalam masa "*biting rate*" perilaku menggigit nyamuk meningkat maka akan terjadi perluasan dan eskalasi kasus Demam Dengue. Pemanasan global dan perubahan lingkungan merupakan variabel utama penyebab meluasnyakasus Demam Berdarah di berbagai belahan dunia (Achmadi, 2008). Lebih dari 2,5 miliar penduduk dunia berisiko terkena penyakit DBD dengan mayoritas atau sekitar 70% populasi hidup di kawasan Asia Pasifik (WHO, 1996).

Angka Kesakitan atau Incidence Rate (IR) DBD per 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 1968-2013.



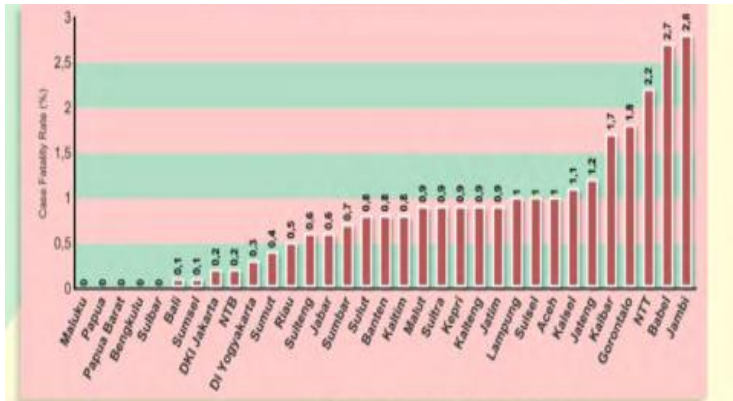
Sumber: Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2013.

Berdasarkan gambar di atas, tampak terlihat angka kesakitan atau *Incidence Rate* (IR) sampai tahun 2013 terus meningkat. Tahun 2010 ke 2011 menurun drastis, namun meningkat kembali dari tahun 2012 ke 2013 (41,25 per 1000 penduduk). Tampak siklus epidemik terjadi setiap sembilan-sepuluh tahunan, hal ini terjadi kemungkinan karena adanya perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kehidupan vektor, di luar faktor-faktor lain yang mempengaruhinya (Depkes, 2010).

Indonesia pernah mengalami kejadian luar biasa (KLB) DBD selama beberapa kali yaitu 1973, 1977, 1978, 1983, 1988, 1996, 1998, 2007 dan 2009. Kasus KLB DBD yang paling tinggi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir adalah pada tahun 2009 dengan jumlah kasus 154.855 dan jumlah penderita yang meninggal sebanyak 1.384 orang. Peningkatan jumlah kasus ini dua kali lipat lebih banyak bila dibandingkan dengan KLB DBD tahun 1998 sebanyak 72.133 dengan penderita yang meninggal sebanyak 1.414 orang (Kemenkes, 2011).

Sementara itu, Angka Kematian (AK) atau *Case Fatality Rate* (CFR) pada tahun-tahun awal kasus DBD merebak di Indonesia sangat tinggi. Kemudian dari tahun ke tahun dapat ditekan mulai 41,4% pada tahun 1968 terus menurun menjadi 0,7% pada tahun 2013. Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan CFR tertinggi pada tahun 2013 yaitu 2,8%, diikuti Kepulauan Bangka Belitung 2,7% dan Nusa Tenggara Timur 2,2%, dapat dilihat pada gambar berikut:

Laju Kematian atau *Case Fatality Rate* (CFR) DBD di Indonesia Tahun 1968-2013



Sumber: Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2013

Pengendalian secara biologis melalui pemanfaatan ikan pemakan jentik merupakan upaya pemanfaatan agent biologi untuk pengendalian vektor DBD yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan pembinaan dari sektor terkait. Pengendalian secara kimiawi melalui penggunaan insektisida masih paling populer baik bagi program pengendalian DBD dan masyarakat. Penggunaan insektisida dalam pengendalian vector DBD bagaikan pisau bermata dua, artinya bisa menguntungkan sekaligus merugikan.

Program pengendalian selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk mau dan mampu melakukan 3 M plus atau PSN di lingkungan mereka. Partisipasi masyarakat merupakan proses panjang dan memerlukan ketekunan, kesabaran dan upaya dalam memberikan pemahaman dan motivasi kepada individu, kelompok dan masyarakat bahkan pejabat secara berkesinambungan, namun karena masyarakat kita sangat

heterogen dalam tingkat pendidikan, pemahaman dan latar belakangnya sehingga belum mampu mandiri dalam pelaksanaannya. Sementara itu, program pengendalian dengan perlindungan individu dapat dilakukan dengan mengurangi kontak dengan nyamuk di dalam keluarga seperti memasang kelambu pada waktu tidur dan kasa anti nyamuk (Sukowati, 2010).

Program pengendalian terakhir yaitu peraturan perundangan. Peraturan perundangan diperlukan untuk memberikan payung hukum dan melindungi masyarakat dari risiko penularan DBD. Oleh karena DBD merupakan penyakit yang berbasis lingkungan, maka pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan oleh sekor kesehatan. Seluruh negara mempunyai undang-undang tentang pengawasan penyakit yang berpotensi wabah seperti DBD dengan memberikan kewenangan kepada petugas kesehatan untuk mengambil tindakan atau kebijakan untuk mengendalikannya. Dengan adanya peraturan perundangan baik undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, maka pemerintah, dunia usaha dan masyarakat wajib memelihara dan patuh.

Pemberantasan penyakit DBD telah diatur di dalam Kepmenkes No. 581 tahun 1992, dengan upaya pemberantasan terdiri dari pencegahan, penemuan, pertolongan dan pelaporan, penyelidikan epidemiologi dan pengamatan penyakit, penanggulangan seperlunya, penanggulangan lain, dan penyuluhan kepada masyarakat. Diatur pula tentang pengorganisasian pelaksanaan di tingkat desa, serta pembinaan pelaksanaan dari tingkat kecamatan, tingkat Dati II dan tingkat Dati I.

Upaya pencegahan dilaksanakan oleh masyarakat di rumah dan Tempat Umum dengan melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Upaya penemuan, pertolongan dan pelaporan penderita DBD dilaksanakan oleh petugas kesehatan. Pengamatan penyakit dilakukan oleh Puskesmas dan penyelidikan epidemiologi dilaksanakan oleh petugas kesehatan dibantu masyarakat dan kepala puskesmas melaporkan hasil penyelidikan kepada Camat, Dinas Kesehatan Dati II disertai rencana penanggulangan seperlunya. Penanggulangan seperlunya dilakukan oleh petugas kesehatan dibantu oleh masyarakat untuk membatasi penyebaran penyakit. Penanggulangan lain dilakukan di desa/kelurahan rawan oleh petugas kesehatan dibantu masyarakat untuk mencegah KLB, selain itu terdapat tugas dan peran petugas kesehatan dan sektor lain berupa penyemprotan masal, pemeriksaan jentik berkala di rumah dan tempat umum (Kepmenkes, 1992).

Upaya pemberantasan selanjutnya yaitu penyuluhan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan sektor lain serta warga masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang DBD melalui jalur informasi dan komunikasi kepada masyarakat, dengan intensif sebelum musim penularan penyakit DBD terutama di daerah rawan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan DBD di tingkat desa maka dibentuk Kelompok Kerja Pemberantasan DBD (Pokja DBD) yang merupakan forum koordinasi kegiatan pemberantasan penyakit DBD dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). (Kepmenkes, 1992).

KLB DBD dapat dihindari bila Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan pengendalian vektor dilakukan dengan baik,

terpadu dan berkesinambungan. Pengendalian vektor melalui surveilans vektor diatur dalam Kepmenkes No. 581 tahun 1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue. Dikatakan bahwa kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan secara periodik oleh masyarakat yang dikoordinir oleh RT/RW dalam bentuk PSN dengan pesan inti 3M plus. Keberhasilan kegiatan PSN antara lain dapat diukur dengan Angka Bebas Jentik (ABJ). Apabila ABJ lebih atau sama dengan 95% diharapkan penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi (Depkes, 2010).

Pengendalian vektor melalui PSN masih merupakan langkah paling efektif saat ini mengingat vaksin untuk pencegahan terhadap infeksi virus dan obat untuk penyakit DBD belum ada. Namun, pengendalian vektor hampir di semua negara dan daerah endemis tidak tepat sasaran, tidak berkesinambungan dan belum mampu memutus rantai penularan. Hal ini disebabkan metode yang diterapkan belum mampu mengacu kepada data/informasi tentang vektor, disamping itu masih mengandalkan kepada penggunaan insektisida dengan cara penyemprotan dan larvasidasi (Sukowati, 2010).

Mengingat kenyataan tersebut, maka penyuluhan tentang vektor dan metode pengendaliannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara berkesinambungan. Karena vektor DBD berbasis lingkungan, maka penggerakan masyarakat tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa peran dari Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti pendidikan, agama, LSM dan lain-lain. Program tersebut akan dapat mempunyai daya ungkit dalam memutus rantai penularan bilamana dilakukan oleh

masyarakat dalam program pemberdayaan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan sistem kewaspadaan dini dan pengendalian, maka perlu peningkatan dan pembenahan sistem surveilans penyakit dan vektor dari tingkat Puskesmas, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, disamping kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor terkait dalam menemukan metode yang mempunyai daya ungkit (Sukowati, 2010).

Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan CFR DBD tertinggi di Indonesia pada tahun 2013 diikuti Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, kejadian DBD telah menyebar ke seluruh kabupaten/kota. Kota Jambi masih mencatat kasus tertinggi sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2014, sesuai dengan *pattern of disease* dari penyakit DBD yaitu *Urban Disesase*. Pada tahun 2014, hampir semua kabupaten di Provinsi Jambi (91%) telah terjangkit penyakit DBD kecuali Kota Sungai Penuh (Profil Dinkes, 2014). Namun, berdasarkan laporan dari Seksi Penanggulangan Penyakit tahun 2015, penyakit DBD telah ditemukan di Kota Sungai Penuh dengan jumlah kasus 17 orang (IR=18,8).

Incidence DBD di Provinsi Jambi pada periode 2006-2010 relatif menurun. Hal ini dimungkinkan oleh dampak intervensi adanya kejadian luar biasa demam chikungunya tahun 2009, dimana upaya pembersihan sarang nyamuk oleh masyarakat masih terus dilakukan. Karena penyakit ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (*Environment Based Disease*) yang terkait erat dengan perilaku hidup bersih dari masyarakat dan pada tahun 2011 terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Tahun berikutnya kasus DBD

mengalami penurunan, tetapi meningkat lagi pada tahun 2014.

Berikut angka kesakitan atau *Incidence Rate* (IR) DBD per bulan per kabupaten.kota di Provinsi Jambi.

Tabel 1. Data Kasus DBD tahun 2015 dan Maret 2016 di Provinsi Jambi.

NO	KABUPATEN/ KOTA	2014		2015		2016 S.D Mar	
		P	M	P	M	P	M
1	Kota Jambi	661	11	575	8	237	2
2	Batang Hari	264	2	115	0	26	1
3	Muaro Jambi	70	0	72	0	40	0
4	Tanjab Barat	123	3	140	0	25	0
5	Tanjab Timur	43	0	70	0	17	0
6	Bungo	102	0	217	0	64	0
7	Tebo	14	0	11	0	2	0
8	Sarolangun	14	0	41	0	8	0
9	Merangin	14	0	87	0	40	1
10	Kerinci	3	0	12	0	0	0
11	Kota Sungai Penuh	0	0	17	0	7	0
	JUMLAH	1308	16	1354	8	466	4

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Kota Jambi merupakan lokasi dengan penderita tertinggi di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Pada tahun 2014 terdapat 661 penderita dengan kematian 11 orang, menurun menjadi 575 penderita dengan kematian 8 orang. Namun di awal tahun 2016 pada akhir bulan Januari tercatat telah mencapai angka 237 orang dengan jumlah kematian yaitu 2 orang. Jumlah penderita sampai dengan bulan Januari 2016 tersebut berdasarkan laporan dari pihak rumah sakit saja yang berada dalam Kota Jambi, namun belum berdasarkan survey epidemiologi dari Dinas Kesehatan Kota Jambi yang kemungkinan jumlah penderita DBD akan lebih besar. Kemungkinan besar akan terjadi lonjakan jumlah penderita yang besar bila dibandingkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Walikota Kota Jambi telah mengeluarkan Instruksi Walikota Jambi Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue di Kota Jambi dengan pelaksanaan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Satu Jam Satu Minggu secara serentak yaitu hari Jumat di seluruh Instansi Pemerintahan, Swasta, Pertokoan, Sekolah-Sekolah, Sarana Ibadah dan Tempat-Tempat Umum, dan hari Minggu di rumah masing-masing dengan mengajak seluruh anggota masyarakat. Instruksi tersebut dilanjutkan dengan Instruksi kedua yaitu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penanganan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui upaya-upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Abatisasi dan melaksanakan Fogging di seluruh wilayah Kota Jambi.

Kabupaten lain di Provinsi Jambi dengan angka kejadian DBD yang cukup signifikan kenaikannya dari

tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Merangin. Tahun 2014 dengan 14 kasus, meningkat signifikan di tahun 2015 dengan 84 kasus, dan 67 kasus dengan 1 orang meninggal per Maret 2016. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada Kabid. P2PL Dinkes Kabupaten Merangin, diketahui bahwa kegiatan penanggulangan DBD di Kabupaten Merangin belum maksimal sebagaimana petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Penanggulangan masih terkotak-kotak antar institusi terkait, begitupun dengan gerakan masyarakat dalam PSN. Masyarakat hanya melaporkan ke Dinkes apabila ada penderita yang telah dirawat dan meminta Dinkes untuk melakukan *fogging* di sekitar rumah penderita. Tim Pokjanal telah dibentuk, dengan sekretariat berada di Biro Kesra Setda Kabupaten Merangin, namun kegiatan belum dilakukan secara maksimal begitupun dengan kader Jumantik yang saat ini dinilai tidak berjalan secara maksimal sedangkan hasil dari pelaksanaan kader Jumantik sehingga Angka Bebas Jentik (ABJ) yang sangat dibutuhkan tidak didapatkan. Anggaran pelaksanaan kegiatan kader Jumantik seharusnya dianggarkan di puskesmas tahun ini tidak diketahui apakah dianggarkan ataukah tidak oleh puskesmas. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinkes sendiri terbatas pada pelaksanaan *fogging* apabila ditemukan 3 orang penderita positif, pemberian Abate ke masyarakat dan penyuluhan ke masyarakat melalui puskesmas. Akan tetapi, sinkronisasi lintas sektor yang diharapkan melalui koordinasi dari sekretariat Tim Pokjanal belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Penanggulangan DBD tidak akan berhasil apabila hanya dilaksanakan oleh sektor kesehatan saja. Sektor kesehatan sebagai instansi teknis dalam penanggulangan

DBD dalam upaya penemuan dan tatalaksana penderita DBD masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain bahwa penemuan kasus secara dini bukanlah hal yang mudah, karena pada awal perjalanan penyakit gejala dan tanda sulit dibedakan dengan gejala infeksi lainnya. Selain itu kasus-kasus yang dilaporkan sebagai DBD tidak semuanya didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium klinik terutama adanya peningkatan hematokrit dan penurunan trombosit sebagaimana kriteria yang ditetapkan oleh WHO. Mengingat vaksin untuk mencegah dan obat pembasmi virus belum ditemukan, maka pemberantasan paling efektif dilaksanakan terutama dengan memberantas nyamuk penularnya. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan pembinaan peran serta masyarakat guna mencegah dan membatasi penyebaran penyakit. Pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat. Oleh karena itu pemberantasan penyakit DBD dilaksanakan melalui kerjasama lintas program dan sektoral yang dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah/Daerah.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan sumber daya pemberantasan DBD yang terdiri dari pengorganisasian Pokja DBD, Tim Pembinaan, serta pembiayaan pemberantasan DBD di Kota Jambi dan Kabupaten Merangin?
2. Bagaimana pelaksanaan program pemberantasan DBD terdiri dari pencegahan, penemuan pertolongan dan pelaporan, penyelidikan epidemiologi dan pengamatan penyakit, penanggulangan seperlunya,

penanggulangan lain, dan penyuluhan di Kota Jambi dan Kabupaten Merangin?

3. Bagaimana gambaran ketepatan pelaksanaan secara umum dari program pemberantasan DBD berdasarkan Kepmenkes No. 581 Tahun 1992 di Kota Jambi dan Kabupaten Merangin?

3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemenuhan sumber daya pemberantasan DBD yang terdiri dari pengorganisasian Pokja DBD, Tim Pembinaan, serta pembiayaan pemberantasan DBD di Kota Jambi dan Kabupaten Merangin?
2. Mengetahui pelaksanaan program pemberantasan DBD terdiri dari pencegahan, penemuan pertolongan dan pelaporan, penyelidikan epidemiologi dan pengamatan penyakit, penanggulangan seperlunya, penanggulangan lain dan penyuluhan di Kota Jambi dan Kabupaten Merangin?
3. Mengetahui ketepatan pelaksanaan program pemberantasan DBD berdasarkan Kepmenkes No. 581 Tahun 1992 di Kota Jambi dan Kabupaten Merangin.

4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak pemerintah daerah tentang implementasi kebijakan pemerintah penanggulangan DBD di Kota Jambi dan Kabupaten Merangin sehingga dapat ditentukan percepatan penanggulangan DBD.

5. Kesimpulan

1. Pemenuhan sumber daya pemberantasan DBD di Kota Jambi sudah terlaksana namun belum maksimal terutama dari sisi tim pembinaan pokjanel di tingkat Dati II dan Kecamatan, sementara itu di Kabupaten Merangin belum terlaksana baik dari pengorganisasian di tingkat desa maupun, kecamatan maupun di Dati II.
2. Pelaksanaan program pemberantasan DBD di Kota Jambi secara umum sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal terutama dari sisi penemuan penderita dimana sosialisasi kepada masyarakat terhadap hal tersebut masih kurang tentunya dengan keterlibatan aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sementara itu, di Kabupaten Merangin juga belum berjalan maksimal dimana belum adanya keterlibatan masyarakat (kader jumantik) dalam pemantauan jentik berkala yang merupakan kunci keberhasilan dari penanggulangan DBD.
3. Ketepatan pelaksanaan program pemberantasan DBD di Kota Jambi, secara umum dapat dikatakan sudah tepat akan tetapi belum berjalan maksimal. Sementara itu, di Kabupaten Merangin dirasa masih belum tepat, dimana belum adanya peranan vital pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kewaspadaan dini berupa pemantauan jentik dalam pemutusan rantai penularan vektor DBD.

6. Saran

1. Mengingat DBD merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan, dimana kunci keberhasilan penanggulangan adalah partisipasi masyarakat, maka pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Untuk itu disarankan kepada pihak kesehatan baik puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk lebih menggiatkan program lintas sektor dalam mendapatkan dukungan aparat pemerintahan dari level tertinggi di Dati II sampai ke level kelurahah/desa, serta lebih menggiatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat.
2. Mencari upaya strategis dengan menggali potensi di masyarakat yang dapat mendukung keberhasilan program penanggulangan DBD.
3. Mengkampanyekan program satu rumah satu jumantik, melalui proses peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap masyarakat untuk mendukung upaya penanggulangan DBD.

IX. Sinergitas Antar Unsur Dan Lembaga Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci) Peneliti Dr. Zarmaili, MM

1. Latar Belakang

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai

dengan 2002, konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Otonomi daerah yang luas menjadi pilihan solusi diantara tarikan tuntutan mempertahankan negara kesatuan atau berubah menjadi Negara federal. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Ni'matul Huda, 2009:13).

Salah satunya yang memiliki otonomi adalah desa. Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, kepentingan yang sama dan bahaya dari luar.

Desa merupakan wilayah penduduk yang mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh adat-istiadat setempat, sifat sosialnya masih tinggi dan hubungan antar masyarakat cukup erat. Di Indonesia saat ini ada lebih kurang 74.000 desa yang tersebar di seantero nusantara. Sehingga tidak asing lagi rasanya kita mendengar kata-kata seperti **pemerintah desa, pembangunan desa, masyarakat desa** dan lainnya.

Menurut pasal 1 UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa pada desa terdapat unsur adat istiadat yang lahir dengan lahirnya desa tersebut. Adat istiadat mengatur tata hidup masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat desa. Oleh karena itu, sistem hidup di masyarakat desa sangat sakral atau suci, karena ia lahir dari jiwa masyarakatnya yang bersih bukan dibuat oleh sekelompok orang atau pejabat.

Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, aturan adat yang mengatur tata hidup masyarakat desa beransur terkikis dan sebagian menjadi punah, karena sistem hukum positif diberlakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Sehingga masyarakat secara beransur-ansur berpaling ke sistem hukum positif dibandingkan dengan sistem hukum adat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari mereka. Padahal, sistem hukum adat sudah teruji dengan kewibawaannya, karena dia tercipta dan terlaksana secara suci berdasarkan kesepakatan dan asal usul masyarakatnya.

Setelah berlakunya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengalami beberapa kali perubahan sehingga UU Nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah dan keluarnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa, memberikan wewenang kepada pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengurus urusannya berdasarkan asal usul adat istiadat desa setempat, artinya kekuasaan desa diberi secara penuh untuk menentukan maju atau mundurnya.

Pelaksanaan sistem pemerintahan desa yang otonomi, banyak desa yang terjadi konflik dan komunikasi yang tidak sehat antara unsur pemerintahan desa, baik antara kepala dengan bawahannya (Kaur-kaur), BPD, Pemuda, BMT maupun dengan lembaga adat dan sebaliknya. Akibatnya proses pembangunan desa dan ekonomi masyarakat terhambat atau terganggu.

Dalam sistem pemerintahan yang baik (*Good Government*), sinergitas antar unsur sangat diperlukan. Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama. Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi. Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan. Bersinergi bertujuan memadukan bagian-bagian yang terpisah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan tertarik melaksanakan penelitian tentang **“Sinergitas antar unsur pada pemerintahan desa; Studi kasus Desa Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci”**

Alasan lokasi ini dipilih, karena desa ini salah satu desa di Provinsi Jambi yang masih mengikuti aturan adat, atau pemerintahan desa dituntun oleh pemerintah adat.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengemukakan sejumlah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana profil Desa Tanjng Pauh Mudik Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana pola pelaksanaan sinergitasantar unsur dalam pembangunan Desa Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci?

3. Kesimpulan

1. Bentuk pemerintahan Desa Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci adalah sistem pemerintahan desa bagian dari hirarkhi pemerintahan adat.
2. Hubungan antar unsur dalam pemerintahan bersifat koordinatif dan komunikatif. Kepala desa berkoordinasi dengan pemerintah adat dan kepala desa berkomunikasi dan saling bertukar pikiran dengan bawahan dan masyarakat.

4. Saran

1. Perlu dibuat suatu regulasi yang detil dan terperinci agar wewenang pemerintah adat lebih kuat dan dapat eksis dalam membangun masyarakat desa.
2. Perlu dibuat model yang baku, agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan berwibawa.

10

KEGIATAN PENELITIAN ANALISIS KEBIJAKAN SECARA ANTISIPATIF DAN RESPONSIF

Kegiatan Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 2 (dua) judul / topic kajian yang dianggap perlu dan penting untuk segera di jadikan bahan kebijakan. Adapun judul kajian kegiatan ini antara lain :

- I. **Kajian Strategi Pengentasan Kerawanan Pangan di Provinsi Jambi** (Tim Peneliti : Prof. Dr. Dompok N, M.Sc, Ir. Asrul Anwar, M.Si, Ir. Mukhlis, M.Si, Weni Lestari, SP, Joni Martin, SH, Novia Susianti, SKM, M.Biomed)

1. Latar Belakang

Kerawanan pangan dan kemiskinan hingga kini masih menjadi masalah utama pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah dari berbagai era kepemimpinan pada hakekatnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan masyarakat dari berbagai keterpurukan ekonomi, namun rona kemiskinan dan kerawanan pangan masih tetap mewarnai kehidupan masyarakat secara nasional. Kerawanan pangan yang dapat diartikan sebagai kegagalan memenuhi kebutuhan pangan yang cukup bagi rumah tangga sangat terkait erat dengan kemiskinan rumah tangga. Dalam sistem ekonomi yang lebih luas,

kerawanan pangan dapat lebih nyata terlihat di wilayah pedesaan yang menjadi basis ekonomi sektor primer.

Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional dan Khususnya Provinsi Jambi dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu Pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Basis Pembangunan Pedesaan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam satu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Disamping itu pembangunan daerah pedesaan sangat penting, terutama dalam penyediaan pangan penduduk, penyediaan tenaga kerja untuk pembangunan, penyediaan bahan baku industri dan penghasil komoditi untuk bahan pangan dan ekspor. Oleh Karena itu desa merupakan salah satu *Entry Point* untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Menurut data statistik yang disajikan melalui Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) Provinsi Jambi yang disusun perKabupaten tahun 2016 menunjukkan, masih terdapat sejumlah wilayah kecamatan dalam Provinsi Jambi yang terkategori menjadi prioritas utama atau rentan terhadap kerawanan pangan. Adapun klasifikasi Kecamatan di Provinsi Jambi Berdasarkan FSVA Provinsi Jambi Tahun 2016 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel Distribusi Wilayah Kecamatan Berdasarkan Prioritas Kebutuhan Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2016

Prioritas	Jumlah	%
1	0	0,00
2	3	2,54
3	17	14,41
4	42	35,59
5	50	42,37
6	6	5,08
Jumlah	118	100,00

Sumber :Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, 2016

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa di Provinsi Jambi tidak terdapat kecamatan yang sangat rentan terhadap kerawanan pangan atau berada pada prioritas 1. Namun terlihat bahwa ada 3 kecamatan yang berada pada prioritas 2 atau rentan terhadap kerawanan pangan dan 17 kecamatan yang berada pada prioritas 3 atau cukup rentan terhadap kerawanan pangan. Dari peta FSVA daerah prioritas 2 berwarna merah yang menunjukkan kecamatan tersebut harus mendapat prioritas khusus dalam peningkatan ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan.

Kecamatan yang rentan terhadap kerawanan pangan dengan kategori prioritas 2 tersebut membutuhkan

pembangunan ketahanan pangan agar krisis pangan tidak terjadi terus menerus. Secara umum daerah rentan pangan disebabkan oleh banyaknya penduduk hidup dibawah garis kemiskinan, rumah tangga tanpa akses terhadap listrik, desa yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, rumah tangga tanpa akses terhadap air bersih dan prevalensi underweight pada balita. Dengan adanya 3 kecamatan yang termasuk dalam prioritas 2 tersebut seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan atau strategi agar daerah tersebut dapat segera terlepas dari kondisi beresiko rawan pangan.

2. Rumusan Masalah

Salah satu fokus pembangunan ekonomi pada saat ini diarahkan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan dengan jalan meningkatkan ketahanan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, ketahanan pangan (*food security*) telah menjadi isu global termasuk di Provinsi Jambi.

Di Provinsi Jambi masih terdapat 3 kecamatan yang berada pada kategori prioritas 2 atau daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan yang tentu saja memiliki beberapa kelemahan yaitu kurangnya akses jalan yang memadai, tingginya angka balita stunting dan kurangnya sarana kesehatan. Oleh karena itu permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur?

2. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi daerah yang rentan terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jambi?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
2. Untuk menganalisis strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi daerah yang rentan terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

4. Manfaat

1. Sebagai bahan masukan bagi Gubernur/Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan sehubungan dengan masalah ketahanan pangan khususnya pada daerah yang rawan pangan.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dan kewenangan kepada Gubernur dan Masyarakat.

5. Kesimpulan

1. Kondisi ketahanan pangan
 - a. Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum sudah baik, hanya 8,2% desa di Kabupaten ini masuk dalam kategori rawan pangan yang terkandala pada akses pangan dan pemanfaatan pangan.

- b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum sudah baik, hanya 3,50% desa di Kabupaten ini masuk dalam kategori rawan pangan yang terkandala pada akses pangan dan pemanfaatan pangan, namun untuk desa sungsang yang mengalami kendala pelayanan dasar dan kesulitan geografis.
2. Beberapa strategi yang bisa dilaksanakan antara lain :
 - a. Memperbaiki insfratraktur listrik baik (PROLISDES) dengan memanfaatkan sumber EBT maupun berkoordinasi dengan PLN.
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan program dana desa untuk memperbaiki jalur produksi pertanian, baik melalui darat maupun sungai.
 - c. Memfokuskan perbaikan insfratraktur dasar bagi desa yang sulit dijangkau, mulai dari akses sarana pendidikan, kesehatan dan pemerintahan.

6. Rekomendasi Kebijakan

1. Memfokuskan program listrik desa ke daerah rawan pangan.
2. Memfokuskan program pertanian terpadu pada daerah rawan pangan.
3. Memberikan insentif lebih kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah rawan pangan dan terpencil.
4. Memperbaiki sanitasi kesehatan.

5. Memberikan insentif sementara kepada masyarakat untuk bercocok tanam, melalui pemanfaatan Kawasan rumah (program KRPL).
6. Memberikan penyuluhan secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk menjaga aset yang telah diberikan pemerintah (aset teknologi listrik, aset teknologi pertanian).
7. Memanfaatkan tenaga penyuluh pertanian dan tenaga pendamping desa agar lebih konsen pada wilayah rentan pangan.

II. Kajian Strategi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Provinsi Jambi (Tim Peneliti :

1. Latar belakang

Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi tahun 2014, bahwa angka pengangguran di Provinsi Jambi masih tinggi yaitu berada pada angka 5,08. Sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kota Sungai Penuh berada pada angka 10,81, Kabupaten Bungo berada pada angka 6,34 dan Kabupaten Batanghari berada pada angka 5,69.

Untuk tingkat kemiskinan, Provinsi Jambi secara keseluruhan juga masih memiliki angka yang tinggi yaitu berada pada angka 8,39. Sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada

angka 13,55, Kabupaten Sarolangun berada pada angka 10,17 dan Kabupaten Merangin berada pada angka 9,37.

Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis secara SWOT untuk menentukan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi terutama pada daerah yang berada pada angka yang tertinggi tersebut.

Sebagai responden dalam penelitian ini adalah, masyarakat penerima bantuan kemiskinan berdasarkan data Bappeda pada tiga kabupaten yang memiliki angka tertinggi dengan tiga kecamatan yang memiliki masyarakat terbanyak mendapat bantuan miskin.

Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode *Strenght, weakness, opportunities, dan threats*.

1. Strenght adalah kekuatan yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam Provinsi Jambi, sehingga dapat ditingkatkan untuk mengatasi angka pengangguran dan angka kemiskinan.
2. Weakness merupakan Kelemahan yang masih ada pada daerah-daerah dalam Provinsi Jambi yang harus diperbaiki dan dihapuskan.
3. Opportunities, merupakan peluang yang dimiliki dan harus dimanfaatkan oleh daerah-daerah dalam Provinsi Jambi untuk mengatasi kelemahan dan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki.
4. Threats, adalah ancaman-ancaman yang dihadapi oleh daerah-daerah dalam Provinsi Jambi yang harus segera dicari solusi penyelesaiannya.

2. Hasil dan kesimpulan

1. Kekuatan (Strenghts)

- a. Masih banyak potensi daerah untuk dikembangkan, dan membuat masyarakat di desa yang tergolong masyarakat miskin tidak menyerah dengan keadaannya, mereka terus berusaha memperbaiki ekonominya, terbukti sekitar 70 % responden menjawab bahwa mereka tidak menyerah dengan keadaan , terus berusaha dan belajar untuk memperbaiki keadaan ekonomi, namun sekitar 30 % merasa putus asa dan menyerah dengan keadaan kehidupan saat ini.
- b. Pola bekerja masyarakat provinsi Jambi yang tergolong masyarakat miskin , hampir sekitar 72 % bekerja setiap hari tanpa ada hari istirahat, misalnya istirahat pada hari minggu, dengan rata-rata bekerja setiap hari sekitar antara 5 – 6 jam, dan yang pernah bekerja di kota hanya sekitar 9 %, sebanyak 91 % hanya bekerja di desa sebagai buruh. Urbanisasi belum banyak terjadi karena di desa masih memiliki potensi untuk memperkerjakan masyarakat yang tergolong miskin, selain itu masyarakat yang tergolong miskin belum mempunyai keberanian mengadu nasib dikota karena tidak memiliki keahlian tertentu untuk mencari rezeki dikota.
- c. Perkembangan sosial politik dilingkungan masyarakat miskin pada umumnya lebih mengarah pada sifat sosial dimana sifat gotong

royong masih mewarnai masyarakat. Untuk kegiatan politik yang berkecimpungan pada organisasi politik hampir tidak ada yang melakukan.

- d. Tingkat kesehatan penduduk miskin masih bagus, pada umum Jenis penyakit yang diderita oleh responden yang tergolong dalam kelompok miskin untuk penyakit ringan sebanyak 34,3 % yaitu terdiri batuk, flu, demam dan pusing kepala, untuk jenis penyakit yang perlu penanganan lebih serius oleh paramedis atau tergolong dengan penyakit berat sekitar 16, % dan yang selalu sehat sampai saat ini dikatakan jarang sakit sekitar 49,3 %.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Kondisi pendidikan penduduk miskin yang menamatkan pendidikan SMA ke atas sangat rendah. Persentase yang menamatkan pendidikan SMA ke atas hanya berada kisaran tidak lebih dari 5% saja dan penduduk miskin yang menamatkan pendidikan SD yaitu sebesar 84 %.
- b. Berdasarkan tingkat pendidikan ini, maka masyarakat Provinsi Jambi yang berkerja tanpa memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka melakukan pekerjaan masih bersifat sangat tradisional dan bertujuan tradisional yaitu hanya cukup memenuhi makan sehari-hari.

- c. Infrastruktur terutama sarana transportasi masih buruk, sehingga masyarakat terkendala untuk membawa hasil usaha mereka. Selain itu, saluran dan daya listrik masih rendah menyebabkan masyarakat terkendala untuk mengolah hasil usaha mereka dengan menggunakan mesin yang memerlukan tenaga listrik.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Komunikasi masyarakat dengan masyarakat luar sudah mudah, jaringan komunikasi baik berupa radio, televisi, handphone dan internet sudah dapat dinikmati oleh masyarakat miskin.
- b. Investor dan penampung produksi masyarakat miskin sudah masuk ke daerah-daerah.
- c. Peminat pasar terhadap hasil usaha masyarakat miskin sangat besar, seperti produk makanan, kerajinan dan konsumsi lainnya.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Masuknya orang asing untuk mengolah sumberdaya yang ada di daerah dengan menggunakan sarana yang canggih dan modern.
- b. Masuknya produk dari luar yang lebih bagus dan menarik dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat miskin di daerah.

- c. Cepatnya terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan tinggi dan biaya besar atau tinggi, sehingga susah diikuti oleh masyarakat miskin.

Strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Jambi

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dapat ditemukan bahwa terdapat beberapa strategi untuk mengentaskan kemiskinan di daerah, di antaranya adalah:

- a. Memberi bantuan beasiswa, dana pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan pendidikan, keterampilan dan penguasaan teknologi, dimana pendidikan yang dibiayai adalah pendidikan yang siap pakai untuk mengolah sumberdaya yang ada di daerah mereka masing-masing.
- b. Memberi biaya atau modal bagi masyarakat miskin untuk menciptakan usaha guna mengolah sumberdaya yang dimiliki.
- c. Memberikan pendampingan usaha bagi masyarakat miskin, sehingga usaha yang dilakukan oleh masyarakat terarah dan bernilai bisnis atau bersifat inovasi.
- d. Menyediakan dan memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi baik darat maupun laut, sehingga mempermudah masyarakat miskin untuk menjual hasil usaha mereka ke luar daerah.

- e. Menyediakan tempat-tempat usaha dan pasar yang tepat bagi penduduk miskin sehingga mereka dapat bekerja dan menjual hasil usaha mereka secara langsung.
- f. Menjalinkan hubungan kerjasama antara pemilik modal dan distributor, sehingga produksi masyarakat miskin tetap laku atau ada pembelinya dan secara langsung masyarakat miskin terikat dengan usahanya guna memenuhi perjanjian kerjasama mereka.

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami telah menyusun *Executive Summary* Hasil Penelitian dan Pengembangan serta kegiatan Penguatan Kelembagaan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi Tahun 2016

Buku Executive Summary ini disusun dalam rangka memberikan informasi singkat atas hasil kegiatan litbang Tahun 2016 kepada para *stakeholder* baik dari unsur pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota maupun perguruan tinggi serta unsur masyarakat lainnya sebagai bahan acuan serta rekomendasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan *Executive Summary* ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan yang sifatnya konstruktif dan membangun guna penyempurnaan laporan dimaksud. Terima kasih

Jambi, Desember 2016

Plt. KEPALA BADAN,

H. RISWANDI, S.Pi, M.Si

Daftar Isi

No.	Judul Kegiatan	Hal.
1	Penelitian Kinerja Puskesmas Dalam Implementasi BPJS Di Provinsi Jambi	1
2	Penelitian Pola Hubungan Lintas Bidang Dalam Pembangunan Perdesaan Di Provinsi Jambi	12
3	Penelitian Potensi Energi Baru dan Terbarukan Di Provinsi Jambi	19
4	Penelitian Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Provinsi Jambi	27
5	Penelitian Pengembangan Daya Saing Produk Lokal Di Provinsi Jambi <i>(Strategi Dan Program Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Di Provinsi Jambi Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah)</i>	35
6	Penelitian Pengembangan Industri Kreatif Di Provinsi Jambi	53
7	Kajian Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Bank Jambi Di Provinsi Jambi	63

8	Penerapan Inovasi Teknologi Pengolahan Zat Pewarna Batik Alam Jambi	75
9	Penelitian Mandiri Untuk Isu-Isu Aktual	84
	<i>1. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Jambi</i>	84
	<i>2. Efikasi Program Dana Desa Dalam Pembangunan Pedesaan Di Kab. Muaro Jambi</i>	91
	<i>3. Model Kemitraan Budi Daya Ikan Air Tawar Di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Pada Desa Kumpeh Ulu)</i>	97
	<i>4. Kajian Pemasaran Dan Daya Saing Pinang Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat</i>	107
	<i>5. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas dan Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Tebo</i>	113
	<i>6. Pengembangan Cerita Rakyat Jambi Sebagai Bahan Ajar Muatan Lokal Bagi Sekolah Dasar</i>	121
	<i>7. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur</i>	128
	<i>8. Implementasi Kebijakan Pemerintah</i>	135

	<i>Dalam Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Dalam. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Jambi</i>	
	9. Sinergitas Antar Unsur Dan Lembaga Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci	149
10	Kegiatan Penelitian Analisis Kebijakan Secara Antisipatif dan Responsif	154
	1. <i>Kajian Strategi Pengentasan Kerawanan Pangan Di Provinsi Jambi</i>	154
	2. <i>Kajian Strategi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Provinsi Jambi</i>	160



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

EXECUTIVE SUMMARY

HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tahun 2016

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)**

**Jln. R.M. Noer Atmadibrata No. 1.A Telanaipura
Telepon (0741) 669352 Fax (0741) 60450
JAMBI – INDONESIA**